



DINAS SOSIAL KABUPATEN BLITAR

**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH DAERAH**

LKJIP

**TAHUN ANGGARAN
2024**

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja LKjIP Dinas Sosial Kabupaten Blitar Tahun 2024 dapat diselesaikan. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), penyusunan Laporan Kinerja (LKjIP) merupakan upaya untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra), hal ini juga merupakan perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta menciptakan *Good and Clean Government*.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKjIP) Dinas Sosial Kabupaten Blitar Tahun 2024 merupakan hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Dinas Sosial Kabupaten Blitar yang tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah, baik dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya. Hal ini sesuai dengan pedoman Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Semoga Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Blitar Tahun 2024 ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2024 dan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dalam meningkatkan kinerja serta penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang akan datang.

Blitar, 28 Februari 2025
Pdt. Kepala Dinas Sosial



Drs. MIKHAEL BANKAM INDORO, M.Si
Penabina Utama Muda
NIP. 19670929 199202 1 002

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kabupaten Blitar Tahun 2024 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya.

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Blitar merupakan suatu rencana jangka menengah tahun 2021 – 2026 yang sangat menentukan dalam meningkatkan kinerja Dinas Sosial dengan urusan Sosial. Pada tahun 2024 mendapat alokasi dari dana APBD sebesar Rp. 17.223.131.900,00 (Tujuh Belas Milyar Dua Ratus Dua Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Rupiah). Anggaran ini terdiri dari Belanja Operasi yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja bantuan sosial.

Anggaran tahun 2024 dialokasikan untuk pelaksanaan 6 Program, 14 kegiatan dan 45 Sub Kegiatan. Total realisasi belanja Dinas Sosial Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2024 khususnya yang terkait dengan program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebesar Rp. 16.162.638.086,54 (Enam Belas Milyar Seratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Delapan Puluh Enam Ribu Lima Puluh Empat Rupiah). Jumlah tersebut mencapai 93,94 % dari anggaran yang telah ditetapkan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penjelasan Umum Organisasi	1
B. Aspek Strategis Organisasi	2
C. Dasar Hukum	4
D. Sistematika Penulisan	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
A. Visi dan Misi	7
B. Tujuan dan Sasaran	7
C. Indikator Kinerja Utama	11
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	13
E. Perencanaan Anggaran Tahun 2024	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
A. Pengukuran Kinerja	20
B. Capaian Kinerja Organisasi	21
1. Sasaran Meningkatnya Kesejahteraan PMKS	21
2. Sasaran Meningkatnya Efisiensi dan Efektivitas serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	55
C. Realisasi Anggaran	66
BAB IV PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Pemecahan Masalah	70
C. Tindak Lanjut	71
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Komposisi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Jabatan	2
Tabel 1.2 Pemetaan Permasalahan Pokok, Masalah dan Akar Masalah	3
Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama	11
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	13
Tabel 2.3 Rincian Anggaran Pada Tahun 2024	13
Tabel 3.1 Pengelompokan Nilai dan Predikat Kinerja	20
Tabel 3.2 Pengelompokan Nilai dan Predikat Kinerja	21
Tabel 3.3 Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kesejahteraan PMKS	21
Tabel 3.4 Perkembangan Kinerja Sasaran Meningkatnya Kesejahteraan PMKS	23
Tabel 3.5 Realisasi Kinerja berdasarkan Indikator Sasaran RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026	24
Tabel 3.6 Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Efisiensi dan Efektivitas serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah terhadap Target Jangka Menengah Renstra	25
Tabel 3.7 Perbandingan capaian kinerja di tingkat Kabupaten	25
Tabel 3.8 Data PMKS di Kabupaten Blitar Tahun 2024	26
Tabel 3.9 Bantuan Sosial yang Disalurkan kepada Fakir Miskin di Kabupaten Blitar pada Tahun 2024	32
Tabel 3.10 Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	35
Tabel 3.11 Capaian SPM Bidang Sosial	36
Tabel 3.12 Rincian Jumlah yang Terlayani Tahun 2024 berdasarkan Penerapan SPM Bidang Sosial	37
Tabel 3.13 Realisasi Anggaran dalam Mendukung Pencapaian Sasaran Meningkatnya Kesejahteraan PMKS	47
Tabel 3.14 Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Efisiensi dan Efektivitas serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	55
Tabel 3.15 Perkembangan Kinerja Sasaran Meningkatnya Efisiensi dan Efektivitas serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	57

Tabel 3.16 Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Efisiensi dan Efektivitas serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah terhadap Target Jangka Menengah Renstra	58
Tabel 3.17 Realisasi Anggaran dalam Mendukung Pencapaian Sasaran Meningkatnya Efisiensi dan Efektivitas serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	61
Tabel 3.18 Realisasi Kinerja Dan Keuangan	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Blitar	2
Gambar 3.1 Grafik Pencapaian Target IKU Dinas Sosial Tahun 2021 - 2024	23
Gambar 3.2 Grafik Pencapaian Target IKU Kabupaten Blitar Tahun 2021 - 2024	24

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penjelasan Umum Organisasi

Dinas Sosial kabupaten Blitar merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut maka Dinas Sosial Kabupaten Blitar menyelenggarakan urusan pemerintahan pada bidang sosial.

Melalui Peraturan Daerah diatas maka disusun Peraturan Bupati Blitar Nomor 101 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Blitar. Dalam ketentuan tersebut menyebutkan Dinas Sosial Kabupaten Blitar merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang sosial dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas, Dinas Sosial Kabupaten Blitar menyelenggarakan fungsi:

1. Penetapan kebijakan teknis di bidang sosial;
2. Pengoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial;
3. Pengoordinasian pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial;
4. Pembinaan UPT;
5. Pengoordinasian pelaksanaan urusan tata usaha Dinas; dan
6. Pengoordinasian pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Bupati.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Blitar maka disusun struktur organisasi. Dinas Sosial Kabupaten Blitar dipimpin oleh Kepala Dinas yang dibantu oleh Sekretariat dan bidang teknis. Adapun susunan organisasi Dinas Sosial Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut.

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Blitar



Dinas Sosial Kabupaten Blitar memiliki ASN sebanyak 26 orang. ASN tersebut terbagi ke dalam jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional. Berikut data ASN pada Dinas Sosial Kabupaten Blitar pada Tahun 2024.

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Jabatan

No	Jenis Jabatan	Jumlah
1	Kepala Dinas	0
2	Sekertaris Dinas	1
3	Kepala Bidang	4
4	Kepala Sub Bagian	1
5	Jabatan Fungsional Tertentu	14
6	Jabatan Fungsional Umum	6
7	Tenaga Harian Lepas	14
	Total	40 Orang

B. Aspek Strategis Organisasi

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Permasalahan tersebut harus dapat diidentifikasi oleh Perangkat Daerah untuk disusun rekomendasi

penanganannya. Rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah. Berikut pemetaan permasalahan pokok, masalah dan akar masalah pada Dinas Sosial Kabupaten Blitar.

Tabel 1.2

Pemetaan Permasalahan Pokok, Masalah dan Akar Masalah

No.	Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Permasalahan
1	Penanganan PMKS belum optimal	Masih tingginya angka kemiskinan	Ketergantungan fakir miskin terhadap bantuan masih tinggi
2	Pemberdayaan PMKS belum optimal		Pemberdayaan sosial belum memfasilitasi seluruh jenis PMKS
			Upaya perlindungan terhadap korban bencana alam belum optimal
			Upaya pemberdayaan masyarakat miskin belum optimal
			Upaya pemberdayaan organisasi sosial di masyarakat belum optimal

Dari pemetaan permasalahan-permasalahan dikemukakan tersebut di atas Dinas Sosial Kabupaten Blitar telah merumuskan isu-isu strategis sebagai berikut:

1. Belum terpenuhinya pelayanan kebutuhan dasar, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial bagi pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
2. Belum optimalnya bantuan tanggap darurat bencana.
3. Belum optimalnya pendayagunaan dan pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan PPKS.
4. Belum maksimalnya pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Data Sektorial yang dilakukan melalui Aplikasi SIDAKSOS untuk kepentingan pembangunan.
5. Masih diperlukan nilai-nilai kesetiakawanan sosial.
6. Sarana prasarana yang terbatas dalam penanganan PPKS.
7. Terbatasnya jumlah sumber daya manusia/aparatur di Dinas Sosial.
8. Belum optimalnya penanggulangan bencana alam dan bencana sosial.
9. Belum mutakhirnya data PPKS dan PSKS di Kabupaten Blitar.
10. Jumlah PPKS yang tidak dapat diprediksi setiap tahun karena bersifat dinamis dan insidentil.

C. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2024 adalah:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Bupati Blitar Nomor 126 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 tentang Petunjuk

- Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar;
4. Peraturan Bupati Blitar Nomor 101 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Blitar.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dan garis besar isi dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kabupaten Blitar Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Kata Pengantar

Ikhtisar Eksekutif

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

BAB I PENDAHULUAN

- A. Penjelasan Umum Organisasi
- B. Aspek Strategis Organisasi
- C. Dasar Hukum
- D. Sistematika

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Visi dan Misi
- B. Tujuan dan Sasaran
- C. Indikator Kinerja Utama
- D. Perjanjian Kinerja
- E. Perencanaan Anggaran

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Pengukuran Kinerja
- B. Capaian Kinerja Organisasi
 - 1. Menjelaskan definisi operasional dari setiap indikator kinerja;
 - 2. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
 - 3. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

4. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
5. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional;
6. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
7. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
8. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Pemecahan Masalah
- C. Tindak Lanjut

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Visi dan Misi

Pemerintah Kabupaten Blitar memiliki visi “Terwujudnya Kabupaten Blitar yang Mandiri dan Sejahtera Berlandaskan Akhlak Mulia, Baldatun Toyyibatun Warobbun Ghofur”. Visi tersebut tertuang dalam dokumen RPJMD Tahun 2021-2026. Dalam dokumen perencanaan 5 tahunan tersebut termuat misi yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi dari Dinas Sosial Kabupaten Blitar adalah Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Blitar Berlandaskan Iman dan Takwa dengan Kearifan Lokal Budaya.

B. Tujuan dan Sasaran

Dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis serta memperhatikan misi Kabupaten Blitar maka dirumuskan tujuan dan sasaran dari Dinas Sosial Kabupaten Blitar. Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran / implementasi dari pernyataan misi. Dengan adanya tujuan akan memberikan arah yang lebih jelas untuk mencapai sasaran yang dituju. Dinas Sosial Kabupaten Blitar menetapkan tujuan dan sasaran, yaitu:

1. Tujuan : Menurunnya Angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
 - a. Sasaran : Meningkatnya Kesejahteraan PMKS
2. Tujuan : Meningkatnya Nilai SAKIP
 - a. Sasaran : Meningkatnya efisiensi dan efektivitas serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

C. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU pada Dinas Sosial Kabupaten Blitar dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional Indikator	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya kesejahteraan PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang tertangani pada tahun (n)}}{\text{Jumlah PMKS yang seharusnya tertangani pada tahun (n)}} \times 100\%$	Laporan Tribulan PPTK (Laporan bantuan sosial yang tersalurkan, laporan penanganan klien rehabilitasi sosial, laporan pemberdayaan sosial, dan laporan korban bencana alam dan sosial yang	Program Rehabilitasi Sosial Program Pemberdayaan Sosial Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Program Penanganan

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional Indikator	Sumber Data	Penanggung Jawab
			Penjelasan: -PMKS merupakan 26 golongan masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial - PMKS yang tertangani adalah PMKS yang diberi sesuatu berupa uang dan/atau barang, misalnya bantuan permakanaan, alat modal usaha, bantuan sosial, serta diberikan pelatihan, pendampingan, rekomendasi dan pelayanan jenis apapun oleh Dinas Sosial - PMKS sasaran adalah masyarakat PMKS yang menjadi target sasaran pemberian bantuan dan terdata pada DTKS	ditangani)	Bencana

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 maka ditetapkan sasaran yang perlu dicapai dan direalisasikan pada setiap tahunnya. Berikut Perjanjian Kinerja tahun 2024 yang memuat sasaran beserta indikator dan target kinerja.

Tabel 2.2

Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kesejahteraan PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	100%
2.	Meningkatnya efisiensi dan efektivitas serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai SAKIP	70

E. Perencanaan Anggaran Tahun 2024

Untuk mewujudkan sasaran dan mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, maka disediakan anggaran sebesar Rp. 13.890.985.682,00. Namun untuk menyesuaikan dinamika dan situasi kondisi pencapaian target kinerja, maka anggaran yang telah tersedia dilakukan perubahan (tambahan dana Insentif Fiskal) dan *refocusing*. Oleh Karena itu, alokasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 17.223.131.900,00 dengan rincian sebagai mana tabel 2.3.

Tabel 2.3

Rincian Anggaran Pada Tahun 2024

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.779.630.969	5.368.142.655
	Perencanaan, Penganggaran,	1.550.448	1.550.448

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)
	dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	775.224	775.224
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	775.224	775.224
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.072.219.102	3.653.345.320
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.035.693.583	3.617.839.801
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36.525.519	35.505.519
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	846.059.203	870.788.785
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	65.021.169	65.021.418
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.303.899	19.309.899
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.739.135	15.738.468
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.288.000	12.888.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	699.207.000	717.337.000
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	40.500.000	40.500.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	102.984.801	105.373.077

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	102.984.801	105.373.077
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	487.276.000	464.023.610
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.722.000	4.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	69.914.000	66.989.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	411.640.000	393.034.610
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	269.541.415	273.061.415
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	178.395.000	178.395.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	63.300.000	66.820.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	27.846.415	27.846.415
2	Program Pemberdayaan Sosial	1.338.859.384	1.338.858.935
	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.400.000	2.754.600
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	2.400.000	2.754.600

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.336.459.384	1.336.104.335
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	7.598.600	7.404.905
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	284.594.250	248.464.635
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1.072.133.334	1.072.234.795
	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	8.133.200	8.000.000
3	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	4.948.870	1.600.000
	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	4.948.870	1.600.000

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)
	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	4.948.870	1.600.000
4	Program Rehabilitasi Sosial	839.452.072	1.114.397.175
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	744.198.777	1.014.643.880
	Penyediaan Permakanan	29.767.800	279.767.800
	Penyediaan Sandang	5.880.225	976.356
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	34.887.925	34.916.897
	Penyediaan Alat Bantu	651.187.827	651.187.827
	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	3.555.000	1.475.000
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	5.075.000	30.075.000
	Pemberian Layanan Kedaruratan	7.300.000	9.700.000
	Pemberian Layanan Rujukan	6.545.000	6.545.000
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah	95.253.295	99.753.295

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)
	Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		
	Penyediaan Permakanan	57.000.000	61.500.000
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	17.778.295	17.778.295
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi	3.950.000	3.950.000
	Pemberian Layanan Rujukan	8.700.000	8.700.000
	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	7.825.000	7.825.000
5	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	5.693.790.262	9.168.790.230
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	5.693.790.262	9.168.790.230
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	107.445.042	734.478.610
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	5.491.452.200	8.339.391.620
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	94.920.000	94.920.000

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)
6	Program Penanganan Bencana	234.304.125	231.342.905
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	105.782.125	93.576.625
	Penyediaan Makanan	84.826.565	84.826.565
	Penyediaan Sandang	8.136.300	2.199.000
	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	8.902.200	2.634.000
	Pelayanan Dukungan Psikososial	3.917.060	3.917.060
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	128.522.000	137.766.280
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	14.972.00	26.916.280
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	113.550.00	110.850.000
	TOTAL	13.890.985.682	17.223.131.900

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja. Pengukuran indikator kinerja sasaran dilaksanakan dalam rangka menjamin adanya peningkatan akuntabilitas kinerja dengan melakukan klarifikasi *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang direncanakan dan diperjanjikan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap seluruh indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dan target yang ditetapkan. Selanjutnya dikelompokkan dalam nilai dan predikat kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.1

Pengelompokan Nilai dan Predikat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kategori
1.	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2.	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3.	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4.	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5.	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Hasil pengukuran kinerja pada Dinas Sosial Kabupaten Blitar atas Perjanjian Kinerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Pengelompokan Nilai dan Predikat Kinerja

No.	Sasaran	Rata-rata Capaian Kinerja	Predikat Kinerja
1.	Meningkatnya Kesejahteraan PMKS	95,39%	Sangat Tinggi
2.	Meningkatnya Efisiensi dan Efektivitas serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	85,93%	Tinggi

B. Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja di atas maka perlu dilakukan analisis untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan. Selain itu analisis capaian kinerja digunakan untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan sebagai masukan dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2024. Berikut analisis capaian kinerja pada Dinas Sosial Kabupaten Blitar Tahun 2024:

1. Sasaran Meningkatnya Kesejahteraan PMKS

Dalam sasaran Meningkatnya Kesejahteraan PMKS dapat diperoleh nilai capaian kinerjanya sebesar 95,39%. Berikut tabel perbandingan capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kesejahteraan PMKS.

Tabel 3.3

Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kesejahteraan PMKS

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Kesejahteraan PMKS	Persentase PMKS yang Tertangani	100%	95,39%	95,39%
Capaian Kinerja					95,39%

Dalam pencapaian sasaran Meningkatnya Kesejahteraan PMKS diukur tingkat keberhasilannya dengan jumlah indikator sebanyak 1 (satu) indikator. Indikator tersebut adalah Persentase PMKS yang Tertangani (PMKS yang tertangani adalah PMKS yang diberi sesuatu berupa uang dan/atau barang, misalnya bantuan permakanan, alat modal usaha, bantuan sosial, serta diberikan pelatihan, pendampingan, rekomendasi dan pelayanan jenis apapun oleh Dinas Sosial). Berdasarkan tabel 3.3 di atas, indikator Persentase PMKS yang Tertangani dapat direalisasi sebesar 95,39%.

Dari data pada tabel 3.3 dapat disimpulkan bahwa untuk sasaran strategis Meningkatnya Kesejahteraan PMKS belum terpenuhi sesuai target. Adapun hal tersebut disebabkan karena angka target persentase PMKS yang tertangani sebesar 100% merupakan rumus lama yang digunakan yang tertera pada Renstra tahun 2021 - 2026, dimana sumber data PMKS diperoleh dari total jumlah laporan yang diterima oleh Dinas Sosial dari wilayah desa/kelurahan se-Kabupaten Blitar pada tahun berjalan. Melainkan, data tersebut tidak diperoleh berdasarkan pendataan, sehingga target ditentukan 100% karena sudah dipastikan seluruh laporan masalah kesejahteraan sosial yang masuk pada Dinas Sosial pasti tertangani. Seharusnya penetapan target perlu dilakukan pendataan awal karena mengingat adanya dinamika sosial, perubahan situasi, keterbatasan dalam mengakses seluruh PMKS serta dinamika anggaran yang tersedia.

Realisasi kinerja tahun 2024 pada sasaran ke-1 yaitu Meningkatnya Kesejahteraan PMKS mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023. Pada Tahun 2023 realisasi sebesar 95,37%, sehingga mengalami kenaikan sebesar 0,02%. Sedangkan dibandingkan tahun 2022, tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 1,31%, dimana tahun 2022 mencapai realisasi sebesar 96,70%. Kenaikan maupun penurunan angka kesejahteraan masyarakat ini dipengaruhi oleh laju pertumbuhan penduduk dan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial pada tahun berjalan yang mendapatkan penanganan layanan sosial, tentunya layanan sosial yang diberikan juga dipengaruhi oleh anggaran yang

tersedia. Berikut perbandingan capaian kinerja dari tahun 2022 hingga 2024:

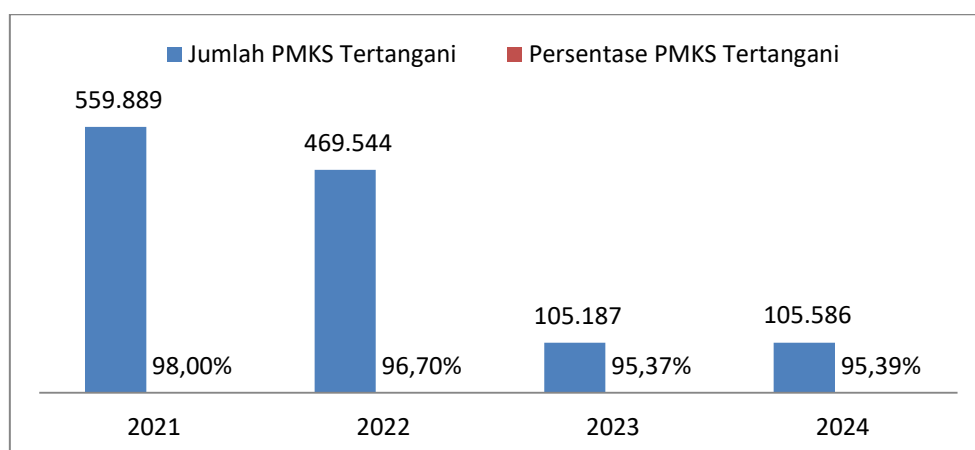
Tabel 3.4

Perkembangan Kinerja Sasaran Meningkatnya Kesejahteraan PMKS

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Meningkatnya Kesejahteraan PMKS	Persentase PMKS yang Tertangani	96,70%	95,37%	95,39%

Gambar 3.1

Grafik Pencapaian Target IKU Dinas Sosial Tahun 2021 - 2024



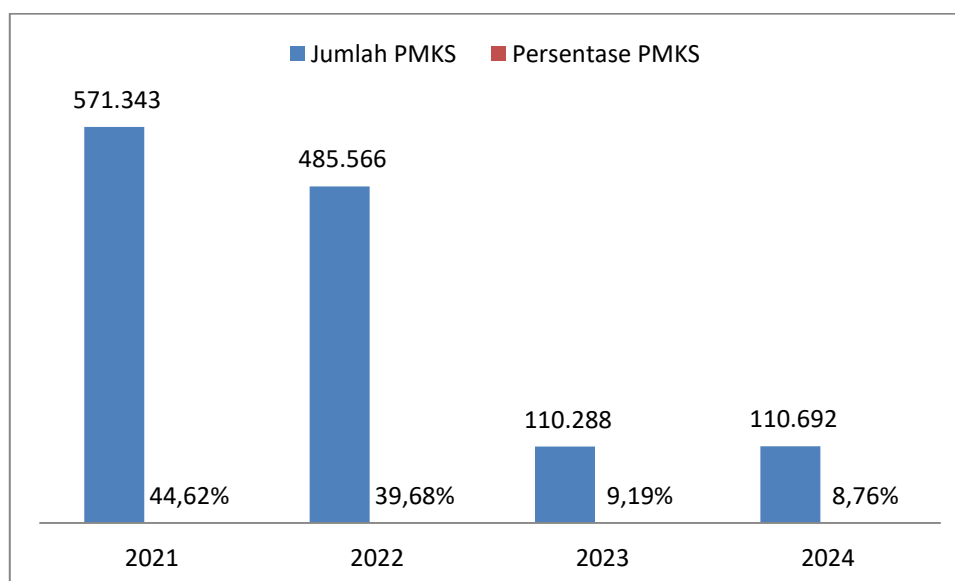
Di samping itu berdasarkan Sasaran RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 yaitu Menurunnya Angka PMKS dengan indikator Persentase Penurunan PMKS pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023 berhasil mengalami penurunan sebesar 0,43%. Semakin menurunnya nilai PMKS menunjukkan semakin baiknya kondisi kesejahteraan PMKS. Hal tersebut dapat dipahami karena penurunan nilai dalam konteks kesejahteraan PMKS berarti berkurangnya jumlah PMKS, misalnya berkurangnya orang yang membutuhkan bantuan sosial, berkurangnya fakir miskin atau berkurangnya jumlah kasus masalah kesejahteraan sosial lainnya. Oleh karena itu, semakin sedikit PMKS yang ada, semakin baik pencapaiannya, karena itu menunjukkan bahwa kondisi

kesejahteraan PMKS semakin meningkat dan lebih banyak orang yang telah keluar dari masalah sosial. Berikut perbandingan capaian kinerja dari tahun 2022 hingga 2024 berdasarkan indikator sasaran RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021 - 2026:

Tabel 3.5
Realisasi Kinerja berdasarkan Indikator Sasaran RPJMD
Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja	Target Awal RPJMD	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024
1.	Menurunnya angka PMKS	11,76	11,51	9,19	9,19	8,76

Gambar 3.2
Grafik Pencapaian Target IKU Kabupaten Blitar Tahun 2021 - 2024



Selain itu, capaian kinerja tahun 2024 ini menjadi capaian akhir dari periode Renstra pada Tahun 2021 – 2026. Berikut perbandingan capaian kinerja Tahun 2024 terhadap target jangka menengah Renstra.

Tabel 3.6

Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Efisiensi dan Efektivitas
serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
terhadap Target Jangka Menengah Renstra

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah Renstra	Realisasi Tahun 2024	Persentase Capaian
1	Meningkatnya Kesejahteraan PMKS	Persentase PMKS yang Tertangani	100%	95,39%	95,39%

Apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tingkat Kabupaten dengan IKU yang sama salah satunya yaitu Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah, maka capaian ini lebih tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan telah memberikan dampak yang signifikan dalam pencapaian kinerja. Berikut perbandingan capaian kinerja dengan daerah lain yaitu Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur.

Tabel 3.7

Perbandingan capaian kinerja di tingkat Kabupaten

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Kab. Lombok Tengah Tahun 2024
1	Meningkatnya Kesejahteraan PMKS	Persentase PMKS yang Tertangani	95,39%	94,25%

Berdasarkan tabel 3.7 dapat dilihat bahwa realisasi Dinas Sosial Kabupaten Blitar dibandingkan dengan Kabupaten Lombok Tengah maka angka capaian lebih tinggi, selisih 1,14%. Dimana jumlah PMKS yang ada di Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2024 sebanyak 146.399 orang

dan jumlah PMKS yang tertangani pada tahun 2024 sebanyak 137.985 orang. Sedangkan pada Kabupaten Blitar jumlah PMKS tahun 2024 sebanyak 110.692 orang dan jumlah PMKS yang tertangani sebanyak 105.582 orang, tentunya capaian ini dipengaruhi oleh jumlah penduduk, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, ketersediaan layanan sosial, kualitas dan jumlah SDM di bidang sosial, faktor geografis, perubahan demografis, tingkat kesadaran masyarakat serta kebijakan pemerintah daerah dalam hal masalah sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial menurut jenis permasalahannya merupakan data yang menjabarkan/mewujudkan mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial yang meliputi kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana dan korban tindak kekerasan, eksploitasi dan deskriminalisasi. Jumlah Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Blitar adalah 110.692 orang (Sumber data dari pendataan PMKS Tahun 2024 Dinas Sosial Kabupaten Blitar).

Data PMKS di Kabupaten Blitar Tahun 2024 dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3.8
Data PMKS di Kabupaten Blitar Tahun 2024

No	Jenis PMKS	Jumlah (orang)	Jumlah Tertangani (orang)
1.	Keluarga fakir miskin	103.110	103.110
2.	Anak jalanan	2	0
3.	Tuna susila	0	0
4.	Pengemis	10	0
5.	Gelandangan	53	53
6.	Balita Terlantar	2	2
7.	Anak Terlantar	28	28
8.	Anak Berhadapan dengan	168	30

No	Jenis PMKS	Jumlah (orang)	Jumlah Tertangani (orang)
	Hukum		
9.	Penyandang Disabilitas (Anak)	655	48
	a) Fisik	278	-
	b) Mental	106	-
	c) Intelektual	115	-
	d) Sensorik	100	-
	e) Ganda	56	-
10.	Anak Korban Tindak Kekerasan/yang Diperlakukan Salah	2	2
11.	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	1	1
12.	Lanjut Usia Terlantar	16	16
13.	Penyandang Disabilitas dan Penyakit Kronis	4.393	1.925
	a) Fisik	1.202	-
	b) Mental	2.013	-
	c) Intelektual	350	-
	d) Sensorik	664	-
	e) Ganda	164	-
14.	Pemulung	23	0
15.	Kelompok Minoritas	0	0
16.	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan	0	0
17.	Orang Dengan HIV/AIDS	0	0
18.	Korban Penyalahgunaan NAPZA	11	0
19.	Korban Trafficking	16	16
20.	Orang Korban Tindak Kekerasan / Diperlakukan Salah	0	0
21.	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	22	1

No	Jenis PMKS	Jumlah (orang)	Jumlah Tertangani (orang)
22.	Korban Bencana Alam	390	230
23.	Korban Bencana Sosial	19	19
24.	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	1.766	100
25.	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	5	1
26.	Komunitas Adat Terpencil	0	0
Jumlah		110.692	105.582

Berdasarkan tabel 3.8 dari 110.692 orang PMKS yang ada di Kabupaten Blitar, jumlah PMKS yang tertangani selama tahun 2024 yaitu sebanyak 105.582 orang. Untuk mencapai target kinerja, pada tahun 2024 Dinas Sosial Kabupaten Blitar telah melakukan upaya dalam mengungkit kinerja yang diharapkan. Beberapa upaya yang dilakukan yaitu terlaksananya program-program penanganan masalah kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Blitar pada Tahun 2024 yang terdiri dari:

1. Lanjut Usia Terlantar

Lanjut Usia terlantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor- faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Pada Tahun 2024 Dinas Sosial Kabupaten Blitar untuk Lansia Terlantar dan Lansia Tidak Potensial diberikan bantuan berupa:

Permakanan lansia, permakanan lansia adalah bantuan yang diberikan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan bagi lanjut usia terlantar dan lanjut usia tidak potensial yang diberikan dalam bentuk makanan siap saji yang penganggarannya dilakukan oleh APBN melalui program Kementerian Sosial RI. Dinas Sosial Kabupaten Blitar bertugas memfasilitasi kegiatan tersebut kepada penerima manfaat. Pada Tahun

2024 terdapat sebanyak 2.478 penerima bantuan permakanan yakni lanjut usia yang terlantar secara ekonomi.

Selain itu, penanganan yang diberikan kepada lanjut usia terlantar secara fisik/*homeless* adalah rehabilitasi sosial pada kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial.

2. Anak yang berhadapan dengan hukum

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.

Program yang mendukung kegiatan anak yang berhadapan dengan hukum adalah Program Rehabilitasi Sosial, Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga. Tujuan kegiatan ini untuk memberikan pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan Hukum baik anak pelaku, korban dan saksi. Kegiatan ini berbentuk asesmen awal setelah adanya laporan pendampingan saat pemeriksaan di kepolisian, pendampingan tahap II di Kejaksaan, pendampingan di pengadilan serta monitoring dan pembinaan lanjut terhadap ABH. Pada tahun 2024 terdapat sebanyak 30 anak yang mendapatkan pendampingan dari pendamping Rehabilitasi Sosial.

3. Penyandang Disabilitas

Penyandang Disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental dan sensorik dalam jangka waktu lama di mana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya. Pada tahun 2024 Dinas Sosial Kabupaten Blitar memfasilitasi bantuan kepada penyandang disabilitas berupa alat

bantu bagi penyandang Disabilitas dan monitoring dan penjangkauan Penyandang Disabilitas dari Kementerian Sosial RI dan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.

a. Alat bantu bagi penyandang disabilitas

Kegiatan pemberian bantuan bagi penyandang disabilitas bertujuan untuk meningkatkan pelayanan terhadap penyandang disabilitas agar dapat menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih baik. Pada tahun 2024 alat bantu bagi penyandang disabilitas yang bersumber dari APBN berupa 12 unit kaki dan tangan palsu, 2 unit kursi roda cerebral palsy, 2 unit motor roda tiga. Sedangkan yang bersumber dari APBD Provinsi terdapat 23 unit alat bantu yang diberikan kepada penyandang disabilitas. Untuk yang bersumber dari APBD Kabupaten terdiri dari 42 unit alat bantu dengar, 2 unit kruk, 129 unit kursi roda standar, dan 4 unit tongkat kaki tiga.

Program ATENSI Kementerian Sosial RI dengan kluster disabilitas anak terdapat sebanyak 40 anak yang menerima bantuan sosial berupa uang dan dibelanjakan berupa barang sesuai proposal yang diajukan serta pemenuhan kebutuhan dasar (sembako dan nutrisi), sedangkan untuk kluster penyandang disabilitas terdapat sejumlah 185 orang yang menerima bantuan sosial berupa pemenuhan kebutuhan dasar (sembako dan nutrisi).

b. Monitoring dan penjangkauan Penyandang Disabilitas

Kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) kepada penyandang disabilitas yang menerima pelatihan Tahun Anggaran 2024 dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan ke Panti Rehabilitasi Sosial.

Kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) kepada penyandang disabilitas yang mendapatkan pelatihan Tahun Anggaran 2024 dilakukan untuk mengetahui perkembangan bantuan yang diterima bagi penyandang disabilitas, sedangkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan ke panti rehabilitasi sosial dilakukan untuk mengirim klien yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan atau rehabilitasi sosial di panti yang telah

ditentukan sesuai dengan keadaan fisik maupun mental klien. Panti rehabilitasi sosial yang dimaksud adalah Panti Rehabilitasi Sosial sebagai UPT dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.

4. Anak Terlantar

Anak Terlantar adalah seorang Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan diterlantarkan orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/ keluarga. Kriterianya adalah berasal dari keluarga fakir miskin, anak yang dilalaikan oleh orang tua dan anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Penyebab utama persoalan anak terlantar adalah keterbatasan ekonomi keluarga dan berbagai masalah lainnya.

Pada tahun 2024 untuk anak terlantar kegiatannya adalah aksesibilitas/pengiriman anak terlantar yang akan mengikuti pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja ke panti-panti sosial yang ada di Jawa Timur, kegiatan ini targetnya adalah agar meningkatkan keterampilan dan kemandirian anak terlantar/ putus sekolah yang ada di Kabupaten Blitar. Pengiriman anak terlantar ke panti sosial di antaranya ke UPT PSBR Jombang dan UPT PSBR Blitar.

5. Fakir Miskin

Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya dengan kriteria tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. Berikut merupakan bantuan sosial yang diberikan kepada fakir miskin di tahun 2024.

Tabel 3.9
Bantuan Sosial yang Disalurkan kepada Fakir Miskin
di Kabupaten Blitar pada Tahun 2024

NO	JENIS BANSOS	PENERIMA		KETERANGAN
1.	PKH (Program Keluarga Harapan)	46.319	KPM	BNI / APBN
2.	BPNT/ BSP (Program Sembako)	84.970	KPM	BNI / APBN
3.	Penerima PBID	82.815	ORG	BPJS/ APBD
4.	Penerima PBIN	482.747	ORG	BPJS/ APBN
5.	Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BLT DBHCHT)	2.628	ORG	DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU (DBHCHT)
6.	Bantuan Modal Usaha UEP Provinsi Jawa Timur (Ds. Ngembul dan Ds. Binangun Kecamatan Binangun)	100	ORG	APBD PROVINSI JAWA TIMUR
7.	Bantuan Sosial Program Kemiskinan Ekstrem 2024 (Bantuan Modal Usaha)	347	ORG	APBD PROVINSI JAWA TIMUR
8.	Bantuan Modal Usaha WRSE (Ds. Kuningan, Ds. Gaprang, Ds. Tlogo, Ds. Sawentar Kec. Kanigoro)	100	ORG	APBD PROVINSI JAWA TIMUR
7.	Paket Bantuan Sembako yang diberikan kepada masyarakat (OVOP, fakir miskin, dll)	256	ORG	DINSOS/ APBD
8.	Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk Masyarakat Pekerja Rentan	8.953	ORG	DINSOS/ APBD
9.	KUBE (Kelompok Usaha Bersama)	6	KLM	DINSOS/ APBD
10.	BLT Insentif Fiskal untuk Masyarakat Miskin Ekstrem	3.529	ORG	DINSOS/ APBD

Usaha Ekonomi Produktif Fakir Miskin (UEP) merupakan sarana penunjang bagi pengembangan usaha yang dijalankan dalam rangka

meningkatkan kesejahteraan sosial. UEP di Dinas Sosial Kabupaten Blitar berbentuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Pada tahun 2024 Dinas Sosial memberikan bantuan UEP pada Fakir Miskin yang terealisasi kepada 46 orang atau 6 kelompok. Penerima berasal dari usulan/proposal keluarga penerima manfaat (KPM) yang KPM tersebut masuk dalam data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Tujuan dari kegiatan pemberian bantuan sosial berupa Usaha Ekonomi Produktif ini adalah:

1. Meningkatkan kemampuan masyarakat khususnya keluarga miskin dalam menjalankan usahanya.
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya keluarga miskin melalui pemberian bantuan barang untuk modal usaha.
3. Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab sosial masyarakat dalam penanganan fakir miskin.

Bantuan sosial Usaha Ekonomi Produktif KUBE-FM berupa pemberian bantuan barang untuk pengembangan usaha, yang direncanakan kepada kelompok masyarakat. Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan kelompok yang beranggotakan 5-20 orang yang didasari kedekatan tempat tinggal, jenis usaha atau keterampilan anggota, ketersediaan sumber daya alam/geografis, latar belakang kehidupan budaya yang sama, dan memiliki motivasi yang sama. KUBE diharuskan memiliki struktur organisasi yang jelas, semua anggota harus terdata di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan setiap anggota hanya boleh berasal dari 1 (satu) Kartu Keluarga (KK).

Tahun 2024 Dinas Sosial memberikan bantuan untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sebanyak 6 kelompok. Penerima bantuan KUBE Tahun 2024 adalah:

- KUBE BINA SEJAHTERA di Desa Gandusari Kecamatan Gandusari dengan jenis usaha aneka makanan (keripik, kue, kopi dan bakso);
- KUBE MAKANAN RINGAN TRISULA di Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan dengan jenis usaha aneka makanan ringan dan kue;

- KUBE SAHABAT BUNDA di Kelurahan Kamulan Kecamatan Talun dengan jenis usaha batik;
- KUBE PERDAGANGAN SUMBER BERKAH di Desa Mronjo Kecamatan Selopuro dengan jenis usaha berjualan aneka sembako/kebutuhan pokok;
- KUBE TEKAD BERKEMBANG di Desa Sumberurip Kecamatan Doko dengan jenis usaha aneka keripik-keripik; dan
- KUBE TUNAS MEKAR di Desa Wates Kecamatan Wates dengan jenis usaha mesin pembuat pakan ternak.

6. Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial

Bencana Alam adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor terganggu fungsi sosialnya.

Korban Bencana Sosial adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

Pada tahun 2024 jumlah korban bencana yang ditangani diantaranya korban bencana alam banjir bandang sebanyak 118 orang, angin kencang sebanyak 65 orang, pohon tumbang sebanyak 3 orang, putting beliung sebanyak 59 orang, tanah longsor sebanyak 4 orang, bencana sosial kebakaran 18 orang, laka air 1 orang dan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) meninggal dunia 1 orang. Bantuan yang diberikan Dinas Sosial kepada korban bencana adalah pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendirian Dapur Umum untuk menyediakan permakanan serta layanan dukungan psikososial yang diberikan oleh Taruna Siaga Bencana (TAGANA). Dalam penanganan bencana, Dinas Sosial bertugas untuk pendirian tenda pengungsian, evakuasi korban bencana, pendirian dapur umum, pemenuhan kebutuhan dasar, dan perlindungan psikososial.

Tujuan penyediaan makanan untuk korban bencana adalah:

1. Untuk terpenuhinya kebutuhan pangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari bagi korban bencana alam dan korban bencana sosial.
2. Tercukupinya gizi korban bencana alam dan sosial sehingga dapat meningkatkan imunitas untuk menghadapi kemungkinan berjangkitnya penyakit ketika berada dalam keadaan darurat.

Selain dilaksanakannya program-program penanganan masalah kesejahteraan sosial, peningkatan kinerja dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial, Dinas Sosial Kabupaten Blitar dibantu oleh Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Berikut rincian Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS):

Tabel 3.10

Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

No.	Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial	Jumlah
1.	Pekerja Sosial Profesional	4 orang
2.	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	136 orang
3.	Penyuluh Sosial Profesional	2 orang
4.	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	48 orang
5.	Tenaga Sosial Kesejahteraan Sosial (TKSK)	22 orang
6.	Pendamping Program Keluarga Harapan	125 orang
7.	Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial	2 orang
8.	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	1 lembaga
9.	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	36 lembaga

Pencapaian peningkatan kinerja tentunya juga dipengaruhi oleh terlaksananya program *mandatory* dengan baik. Salah satunya yaitu penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang

merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal, sesuai dengan amanat Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta untuk mendukung tercapainya pelaksanaan program-program pembangunan bidang kesejahteraan sosial di daerah, pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Dinas Sosial Kabupaten Blitar diperlukan adanya pedoman yang dapat dijadikan acuan dasar bagi terwujudnya capaian kinerja Perangkat Daerah terhadap bidang atau urusan wajib yang menjadi tugas pokoknya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang memberikan kewajiban kepada pemerintah daerah membuat dan menyusun Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan urusan wajib yang merupakan kewenangannya.

Berdasarkan Pasal 26 Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Kabupaten/Kota, jenis pelayanan dasar pada SPM bidang sosial meliputi : 1) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti; 2) Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti; 3) Rehabilitasi sosial Dasar Lanjut usia Terlantar di Luar Panti; 4) Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti; dan 5) Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Pasca Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota. Berikut perbandingan capaian kinerja penerapan SPM ada Dinas Sosial Tahun Anggaran 2024 :

Tabel 3.11

Capaian SPM Bidang Sosial

No	Kategori Indeks Pencapaian SPM	Target		Realisasi	
		2023	2024	2023	2024
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar	100%	100%	100%	100%

No	Kategori Indeks Pencapaian SPM	Target		Realisasi	
		2023	2024	2023	2024
	di Luar Panti				
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	100%	100%	100%	100%
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	100%	100%	100%	100%
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	100%	100%	100%	100%
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%

Tabel 3.12

Rincian Jumlah yang Terlayani Tahun 2024 berdasarkan
Penerapan SPM Bidang Sosial

No	Kategori Indeks Pencapaian SPM	Satuan	Target	Realisasi
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti		974	974
1	Layanan data dan pengaduan	orang	42	42
2	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	orang	42	42
3	Penyediaan permakanan	orang	762	762
4	Penyediaan sandang	orang	7	7
5	Penyediaan alat bantu	orang	184	184
6	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	orang	7	7
7	Pemberian bimbingan fisik,	orang	7	7

No	Kategori Indeks Pencapaian SPM	Satuan	Target	Realisasi
	mental, spiritual dan sosial			
8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	orang	42	42
9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	orang	42	42
10	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	orang	42	42
11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	orang	42	42
12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	orang	42	42
13	Layanan rujukan	orang	42	42
	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti		60	60
1	Layanan data dan pengaduan	orang	60	60
2	Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat	orang	60	60
3	Penyediaan permakanan	orang	3	3
4	Penyediaan sandang	orang	3	3
5	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	orang	3	3
6	Penyediaan perbekalan kesehatan	orang	3	3

No	Kategori Indeks Pencapaian SPM	Satuan	Target	Realisasi
	(Penyediaan P3K)			
7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	orang	60	60
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	orang	60	60
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	orang	60	60
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	orang	60	60
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	orang	60	60
12	Layanan rujukan	orang	60	60
	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti		2560	2560
1	Layanan data dan pengaduan	orang	16	16
2	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	orang	16	16
3	Penyediaan permakanan	orang	2546	2546
4	Penyediaan sandang	orang	2	2
5	Penyediaan alat bantu	orang	2	2
6	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	orang	2	2
7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	orang	2	2

No	Kategori Indeks Pencapaian SPM	Satuan	Target	Realisasi
8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlantar	orang	16	16
9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah / Bukti dokumen kependudukan	orang	16	16
10	Akses ke layanan kesehatan dasar / fasilitasi layanan kesehatan	orang	16	16
11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	orang	16	16
12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	orang	16	16
14	Layanan rujukan	orang	16	16
	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti		54	54
1	Layanan data dan pengaduan	orang	54	54
2	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	orang	54	54
3	Penyediaan permakanan	orang	6	6
4	Penyediaan sandang	orang	6	6
5	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	orang	6	6
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	orang	6	6
7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan	orang	54	54

No	Kategori Indeks Pencapaian SPM	Satuan	Target	Realisasi
	dan pengemis			
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	orang	54	54
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	orang	54	54
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	orang	54	54
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	orang	54	54
12	Layanan rujukan	orang	54	54
	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota		269	269
1	Penyediaan permakanan	orang	269	269
2	Penyediaan sandang	orang	48	48
3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	unit	33	33
4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	orang	6	6
5	Pelayanan dukungan Psikososial	orang	100	100

Uraian penjelasan dari tabel di atas, untuk kategori indeks pencapaian SPM Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas

Terlantar di Luar Panti sumber data diperoleh dari klien yang ditampung sementara di Shelter PPKS Dinas Sosial Kab. Blitar, klien terlantar yang tertangani pada tahun berjalan tetapi tidak ditampung di dalam shelter, penerima program permakanan dari Kementerian Sosial RI dan penerima bantuan sosial berupa alat bantu yang bersumber dari APBD Kabupaten Blitar.

Pada kategori indeks pencapaian SPM Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti sumber data diperoleh dari klien yang ditampung sementara di Shelter PPKS Dinas Sosial Kab. Blitar dan klien terlantar yang tertangani pada tahun berjalan tetapi tidak ditampung di dalam shelter. Berikutnya pada kategori indeks pencapaian SPM Rehabilitasi Sosial Dasar Lansia di Luar Panti sumber data diperoleh dari klien yang ditampung sementara di Shelter PPKS Dinas Sosial Kab. Blitar dan klien terlantar yang tertangani pada tahun berjalan tetapi tidak ditampung di dalam shelter, penerima program permakanan dari Kementerian Sosial RI dan penerima bantuan BAZNAS Kabupaten Blitar.

Pada kategori indeks pencapaian SPM Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti sumber data diperoleh dari klien yang ditampung sementara di Shelter PPKS Dinas Sosial Kab. Blitar dan klien terlantar yang tertangani pada tahun berjalan tetapi tidak ditampung di dalam shelter. Terakhir untuk kategori indeks pencapaian SPM Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota sumber data diperoleh dari korban bencana alam dan sosial yang tertangani pada tahun berjalan.

Tidak hanya *mandatory* berupa penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) akan tetapi juga adanya penambahan anggaran Insentif Fiskal. Dinas Sosial Kabupaten Blitar menerima pembagian Dana Insentif Fiskal sebesar Rp. 4.750.000.000,00 (Empat Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Dana Insetif Fiskal tersebut sebesar Rp. 250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dialokasikan berupa paket sembako untuk diserahkan kepada masyarakat dengan

target 1.000 orang, sasarannya adalah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Sedangkan anggaran sebesar Rp. 4.500.000.000,00 (Empat Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) dialokasikan berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan target penerima 5.000 orang, setiap orang menerima Rp. 900.000,00 (Sembilan Ratus Ribuan Rupiah) untuk 3 bulan mulai dari Bulan Oktober, November dan Desember. Perubahan anggaran yang terjadi tentunya membawa dampak pada perumusan Perjanjian Kinerja perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar melalui reviu/perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Total Realisasi berdasarkan DPA Tahun 2024 khusus untuk Dana Insentif Fiskal sebesar Rp. 4.750.000.000,00 (Empat Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yaitu sebesar Rp. 3.408.850.000,00 (Tiga Miliar Empat Ratus Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribuan Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Rehabilitasi Sosial

Pagu Anggaran DPA 2024	: Rp. 250.000.000,00
Total Anggaran Realisasi	: Rp. 232.750.000,00
Sasaran Penerima Manfaat (PM)	: Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang bersumber dari Data Kemiskinan Daerah (DKD) Kabupaten Blitar Tahun 2023 dengan kategori miskin dan tidak mampu
Bantuan Sosial berupa	: Paket Sembako
Target Penerima Manfaat (PM)	: 1.000 orang, dari total target tersebut yang berhasil salur sebanyak 984 orang sedangkan gagal salur sebanyak 16 orang dikarenakan meninggal dunia dan pindah alamat
Periode Penyaluran	: Bulan Desember 2024

2. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Pagu Anggaran DPA 2024	: Rp. 4.500.000.000,00
Total Anggaran Realisasi	: Rp. 3.176.100.000,00
Sasaran Penerima Manfaat (PM)	: Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang bersumber dari Data Kemiskinan Daerah (DKD) Kabupaten Blitar Tahun 2023 dengan kategori miskin ekstrem dan usulan baru yang telah terverval berdasarkan hasil musdes/ muskel dan diverifikasi ulang Tahun 2024 secara manual terkait kepesertaan bansosnya dan kelayakan melalui musdes/ muskel
Bantuan Sosial berupa	: Bantuan Langsung Tunai (BLT) uang tunai dengan nominal Rp. 900.000,00 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah), diberikan selama 3 (tiga) bulan, mulai Bulan Oktober, November dan Desember 2024
Target Penerima Manfaat (PM)	: 5.000 orang, dari total target tersebut yang berhasil salur sebanyak 3.529 orang sedangkan gagal salur sebanyak 196 orang dikarenakan meninggal dunia dan pindah alamat
Periode Penyaluran	: Bulan Desember 2024
STS Pengembalian Anggaran	: Rp. 176.400.000,00

Dari seluruh upaya yang telah dilakukan pada tahun 2024 masih ditemui kendala dan hambatan. Kendala dan hambatan tersebut belum dapat diatasi sehingga menyebabkan realisasi kinerja terealisasi secara tidak optimal. Kendala dan hambatan dalam pencapaian sasaran meningkatnya kesejahteraan PMKS adalah sebagai berikut.

1. Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan hanya satu orang selama tahun 2024 karena tidak adanya sinergitas dengan Dinas Tenaga Kerja dan BP2MI;
2. Kurang aktifnya operator SIKS-NG tingkat desa dalam melaksanakan verifikasi dan validasi data karena beban kerja di luar tugas sebagai operator SIKS;
3. Sudah tidak adanya desil/tingkat kesejahteraan sosial sebagai tolak ukur jumlah kemiskinan dan prioritas penerima bantuan sosial, dimana Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial pada aplikasi SIKS-NG yang digunakan sebagai penyanding data penerima bansos APBD, parameternya belum jelas dan kurang terperinci serta banyak data yang kurang tepat, dinamis/berubah-ubah, sehingga menyulitkan proses verifikasi dan validasi data penerima bansos. Selain itu adanya kebijakan Kemensos bahwa database DTKS dalam format excel tidak diperkenankan diberikan kepada Pemerintah Daerah;
4. Masih tercampurnya data penerima bantuan sosial yang bersumber dari APBN (PKH, BPNT) antara yang aktif dan non aktif pada Aplikasi SIKS-NG, sehingga tidak diketahui berapa jumlah penerima yang berhasil salur dan gagal salur;
5. Kendala dalam penyaluran bantuan permakanan bagi korban bencana apabila jumlah korban bencana hanya sedikit sehingga tidak memerlukan Dapur Umum;
6. Banyaknya usaha dari penerima bantuan sosial kewirausahaan KUBE yang tidak berkembang bahkan kepesertaan dalam usaha kelompok semakin berkurang;
7. Masalah kesejahteraan sosial seringkali sangat kompleks dan melibatkan berbagai faktor yang saling terkait, seperti kemiskinan, pengangguran, ketidaksetaraan pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Setiap masalah sosial memiliki dinamika yang unik dan dapat dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang berubah-ubah, sehingga sulit memprediksi dengan akurat untuk menentukan target (berapa banyak orang yang akan dijangkau)

- dan menentukan ketercapaian realisasi kegiatan (manfaat yang bisa diperoleh);
8. Kesulitan untuk melakukan intervensi monitoring dan evaluasi atas ektivitasnya pelaksanaan program bantuan sosial karena tidak adanya informasi *By Name By Address* (BNBA) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) penerima bansos APBN;
 9. Banyaknya Bayi Baru Lahir (BBL) yang tidak terdeteksi (non aktif) sebagai peserta PBI-JKN meskipun anggota dalam 1 KK terdaftar sebagai kepesertaan PBI-JKN, hal tersebut disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat untuk pelaporan adminduk atas Bayi Baru Lahir (BBL);
 10. Terbatasnya anggaran untuk pendataan PMKS, sehingga pendataan belum dapat dilakukan secara menyeluruh di wilayah, melainkan sementara pendataan masih dilakukan dengan sinergitas bersama instansi/perangkat daerah terkait.

Realisasi kinerja di atas didukung oleh penggunaan sumber daya termasuk anggaran. Jumlah alokasi anggaran pada program/kegiatan yang digunakan untuk mewujudkan sasaran meningkatnya kesejahteraan PMKS adalah sebesar Rp. 11.854.989.245,00 dengan realisasi sebesar Rp. 11.116.008.650,00 Berikut rincian realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran meningkatnya kesejahteraan PMKS.

Tabel 3.13
Realisasi Anggaran dalam Mendukung Pencapaian Sasaran
Meningkatnya Kesejahteraan PMKS

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
1	Meningkatnya Kesejahteraan PMKS	95,39%	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Rp. 1.338.858.935	Rp. 1.295.578.750	96,77%
			<i>Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota</i>	Rp. 2.754.600	Rp. 2.525.000,00	91,66%
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Rp. 2.754.600	Rp. 2.525.000,00	91,66%
			<i>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota</i>	Rp. 1.336.104.335	Rp. 1.293.053.750	96,78%
			Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Rp. 7.404.905	Rp. 7.313.900	98,77%
			Peningkatan Kemampuan	Rp. 248.464.635	Rp. 245.105.000	98,65%

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
			Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota			
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 1.072.234.795	Rp. 1.032.634.850	96,31%
			Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Rp. 8.000.000	Rp. 8.000.000	100%
			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Rp. 1.600.000	Rp. 800.000	50%
			<i>Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi</i>	Rp. 1.600.000	Rp. 800.000	50%

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
			<i>di Daerah Kabupaten/ Kota untuk Dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal</i>			
			Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/ Kota untuk dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal	Rp. 1.600.000	Rp. 800.000	50%
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rp. 1.114.397.175	Rp. 1.060.562.000	95,17%
			<i>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</i>	Rp. 1.014.643.880	Rp. 969.297.000	95,53%
			Penyediaan Permakanan	Rp. 279.767.800	Rp. 261.848.000	93,59%
			Penyediaan Sandang	Rp. 976.356	Rp. 919.500	94,18%

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
			Penyediaan Alat Bantu	Rp. 651.187.827	Rp. 650.908.500	99,96%
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Rp. 34.916.897	Rp. 15.000.000	42,96%
			Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Rp. 30.075.000	Rp. 24.755.000	82,31%
			Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak	Rp. 1.475.000	Rp. 960.000	65,08%
			Pemberian Layanan Kedaruratan	Rp. 9.700.000	Rp. 8.530.000	87,94%
			Pemberian Layanan Rujukan	Rp. 6.545.000	Rp. 6.376.000	97,42%
			<i>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</i>	Rp. 99.753.295	Rp. 91.265.000	91,49%
			Penyediaan Permakanan	Rp. 61.500.000	Rp. 58.560.000	95,22%

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
			Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Rp. 17.778.295	Rp. 17.375.000	97,73%
			Pemberian Layanan Reunifikasi Keluarga	Rp. 3.950.000	Rp. 1.440.000	36,46%
			Pemberian Layanan Rujukan	Rp. 8.700.000	Rp. 6.470.000	74,37%
			Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Rp. 7.825.000	Rp. 7.420.000	94,82%
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Rp. 9.168.790.230	Rp. 8.551.166.400	93,26%
			<i>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</i>	Rp. 9.168.790.230	Rp. 8.551.166.400	93,26%
			Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah	Rp. 734.478.610	Rp. 712.924.800	97,07%

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
			Kabupaten/Kota			
			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Rp. 8.339.391.620	Rp. 7.743.801.600	92,86%
			Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Rp. 94.920.000	Rp. 94.440.000	99,49%
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Rp. 231.342.905	Rp. 207.901.500	89,87%
			<i>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</i>	Rp. 93.576.625	Rp. 72.776.500	77,77%
			Penyediaan Makanan	Rp. 84.826.565	Rp. 64.101.500	75,57%
			Penyediaan Sandang	Rp. 2.199.000	Rp. 2.187.000	99,45%
			Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Rp. 2.634.000	Rp. 2.625.000	99,66%
			Pelayanan Dukungan Psikososial	Rp. 3.917.060	Rp. 3.863.000	98,62%
			<i>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat</i>	Rp. 137.766.280	Rp. 135.125.000	98,08%

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
			<i>Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota</i>			
			Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Rp. 26.916.280	Rp. 24.320.000	90,35%
			Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Rp. 110.850.000	Rp. 110.805.000	99,96%
			Realisasi Anggaran	Rp. 11.854.989.245	Rp. 11.116.008.650	93,77%
			Tingkat efisiensi			6,23%

Berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran program dan kegiatan di atas maka dapat diketahui efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran meningkatnya kesejahteraan PMKS Capaian realisasi kinerja diperoleh sebesar 95,39% sedangkan realisasi anggaran diperoleh sebesar 93,77%. Oleh karena itu efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran meningkatnya kesejahteraan PMKS dengan nilai efisiensi sebesar 6,32%.

Untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya maka perlu adanya alternatif solusi sebagai rencana tindak lanjut untuk mewujudkan kinerja sasaran meningkatnya kesejahteraan PMKS. Berikut alternatif solusi sebagai rencana tindak lanjut berdasarkan analisis capaian kinerja.

1. Kerjasama, sinergitas dan optimalisasi antar perangkat daerah dalam penanganan kemiskinan;
2. Kerjasama, sinergitas dan optimalisasi antar perangkat daerah dalam penanganan PMKS;
3. Melaksanakan program inovasi Sistem Layanan Pendampingan dan Pencatatan Bayi Baru Lahir Kabupaten Blitar (SIAPP BALITAR) dengan tujuan pendampingan registrasi NIK Bayi Baru Lahir (BBL) untuk mencegah non aktifnya kepesertaan PBI-JKN;
4. Melaksanakan Integrasi data PMKS yang bersumber dari beberapa instansi/perangkat daerah terkait;
5. Meningkatkan kerjasama dengan OPD dan stakeholder terkait;
6. Melaksanakan pemutakhiran data PMKS;
7. Update data disabilitas dan lansia sebagai data dukung pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
8. Pemulangan warga negara migran sesuai dengan Standar Operasional Prosedur;
9. Berkoordinasi dengan Bappedalitbang dalam penyelenggaraan forum tanggung jawab sosial perusahaan (CSR);
10. Memberikan fasilitas peningkatan kapasitas bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);

11. Melakukan penyebarluasan informasi terkait ragam dan prosedur layanan sosial melalui media sosial;
12. Mempersiapkan rencana kerja dan penganggarnya untuk dapat menyediakan bantuan sosial yang bersifat pemberdayaan yaitu bantuan ekonomi produktif bagi masyarakat miskin.

2. Sasaran Meningkatnya Efisiensi dan Efektivitas serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Dalam sasaran Meningkatnya Efisiensi dan Efektivitas serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dapat diperoleh nilai capaian kinerjanya sebesar 85,93%. Berikut tabel perbandingan capaian kinerja sasaran Meningkatnya Efisiensi dan Efektivitas serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.

Tabel 3.14

Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Efisiensi dan Efektivitas serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Efisiensi dan Efektivitas serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai dan Predikat SAKIP	70	60,15	85,93%
Capaian Kinerja					85,93%

Dalam pencapaian sasaran Meningkatnya Efisiensi dan Efektivitas serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah diukur tingkat keberhasilannya dengan jumlah indikator sebanyak 1 (satu) indikator. Indikator tersebut adalah Nilai dan Predikat SAKIP. Berdasarkan tabel 3.10 di atas, indikator Nilai dan Predikat SAKIP dapat direalisasi sebesar 85,93% dengan nilai 60,15 (kategori 'B' dengan predikat 'BAIK').

Dari data pada tabel 3.14 dapat disimpulkan bahwa untuk sasaran strategis Meningkatnya Efisiensi dan Efektivitas serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah belum terpenuhi sesuai target. Adapun hal tersebut disebabkan karena dokumen belum seluruhnya terpenuhi, diantaranya adalah:

1. SOP monev Renstra belum ditetapkan, masih menunggu tanda tangan pimpinan
2. Perjanjian Kinerja 2024 Kadin yang tertuang adalah program yang seharusnya sasaran
3. Belum terdapat cascading kinerja
4. Belum ada notulen pembahasan perencanaan kinerja
5. Sudah terdapat rencana aksi tahun 2023 dan 2024, namun belum terdapat pemantauan rencana aksi
6. Belum ada pengukuran kinerja
7. Belum ada data kinerja
8. Belum ada monitoring rencana aksi dilampiri data kinerja
9. Renaksi sudah tersaji pertriwulan, namun belum ada pengukuran kinerja yang dilakukan secara berjenjang
10. Pengumpulan data kinerja belum memanfaatkan teknologi informasi
11. Pengukuran kinerja belum dapat mempengaruhi penyesuaian kebijakan, aktivitas dan anggaran dalam mencapai kinerja
12. Laporan kinerja yang disampaikan belum menginfokan realisasi kinerja dengan target tahunan, beberapa tahun sebelumnya, *benchmark* nasional
13. Laporan kinerja belum menganalisis sesuai dengan kinerja yang diperjanjikan
14. Belum menginformasikan upaya nyata dan atau hambatan setiap indikator kinerja
15. Informasi dalam laporan kinerja belum dapat dimanfaatkan dalam penyesuaian anggaran, evaluasi pencapaian keberhasilan dan perencanaan kinerja yang akan dihadapi kedepan serta perubahan budaya kerja

16. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum dilaksanakan
17. Evaluasi akuntabilitas kinerja belum dilaksanakan menggunakan teknologi informasi (aplikasi)
18. Tindaklanjut evaluasi internal dan evaluasi APIP dari total 22 yang sudah ditindaklanjuti 15.

Realisasi kinerja tahun 2024 pada sasaran Meningkatnya Efisiensi dan Efektivitas serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 dan 2022. Penurunan kinerja ini lebih banyak disebabkan oleh belum terpenuhinya dokumen perencanaan dan evaluasi sesuai dengan peraturan yang ditetapkan serta ketidaksesuaian dokumen perencanaan dengan penganggaran. Selain itu, penetapan target belum didukung dengan basis data yang memadai. Target kinerja penurunan angka PMKS dalam Perjanjian Kinerja sebesar 100%, namun pada saat evaluasi belum didapatkan penjelasan terkait jenis dan jumlah PMKS yang ditangani setiap tahun hingga berakhirnya periode renstra. Berikut perbandingan capaian kinerja dari tahun 2022 hingga 2024:

Tabel 3.15

Perkembangan Kinerja Sasaran Meningkatnya Efisiensi dan Efektivitas serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Meningkatnya Efisiensi dan Efektivitas serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai dan Predikat SAKIP	70,71	60,82	60,15

Selain itu, capaian kinerja tahun 2024 ini menjadi capaian akhir dari periode Renstra pada Tahun 2021 – 2026. Berikut perbandingan capaian kinerja Tahun 2024 terhadap target jangka menengah Renstra.

Tabel 3.16

Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Efisiensi dan Efektivitas serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah terhadap Target Jangka Menengah Renstra

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah Renstra	Realisasi Tahun 2024	Persentase capaian
1	Meningkatnya Efisiensi dan Efektivitas serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai dan Predikat SAKIP	-	60,15	85,93%

Untuk mencapai target kinerja di atas, pada tahun 2024 Dinas Sosial Kabupaten Blitar telah melakukan beberapa upaya dalam mengungkit kinerja yang diharapkan. Beberapa upaya yang dilakukan yaitu:

1. Menyusun rencana kerja (Renja) yang realistis dan berbasis hasil (*outcome*). Hal utama yang perlu dilakukan yaitu memastikan basis data yang digunakan guna menghitung atau menentukan target dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dan sasaran strategis yang ditetapkan. Selain itu, basis data yang telah disusun, juga dilakukan pemutakhiran data melihat bahwa data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) memiliki dinamika yang
2. Melakukan evaluasi berkala terhadap capaian kinerja untuk memastikan akuntabilitas. Menyusun dokumen evaluasi per

triwulan pada tiap bidang yang melaksanakan program penunjang urusan sasaran strategis.

3. Memastikan anggaran tersusun berdasarkan program/kegiatan prioritas yang berdampak nyata. Anggaran yang terbatas harus dialokasikan secara efektif untuk program yang benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat miskin dan rentan. Program prioritas tersebut diantaranya Standar Pelayanan Minimal (SPM), penanganan stunting, dan pengentasan kemiskinan ekstrem yang merupakan prioritas nasional dan daerah yang harus dicapai.
4. Meningkatkan koordinasi antar instansi guna sinkronisasi kebijakan dan program. Menindaklanjuti salah satu tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 berupa penurunan angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan dalam rangka memaksimalkan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Blitar dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dilakukan kerja sama dengan perangkat daerah terkait dalam hal penjangkauan data.
5. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang sesuai standar. Melihat hasil evaluasi SAKIP pada tahun sebelumnya terkait format laporan kinerja yang belum mencakup analisis seluruh sasaran serta analisis perbandingan setiap periode, upaya perbaikan ini sudah mulai dilakukan.

Dari seluruh upaya yang telah dilakukan pada tahun 2024 masih ditemui kendala dan hambatan. Kendala dan hambatan tersebut belum dapat diatasi sehingga menyebabkan realisasi kinerja terealisasi secara tidak optimal. Kendala dan hambatan dalam pencapaian sasaran Meningkatnya Efisiensi dan Efektivitas serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut.

1. Keterbatasan anggaran untuk melakukan pendataan terhadap sasaran Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), akibatnya perolehan data masih belum bisa dilakukan pendataan di wilayah baik desa/kelurahan secara menyeluruh, sehingga

untuk mengantisipasi masalah tersebut basis data yang digunakan yaitu kompilasi dari beberapa instansi/perangkat daerah terkait yang mengampu kategori PMKS. Hal ini tentunya mempersulit penetapan target kinerja karena belum didukung dengan basis data yang memadai. Begitu juga dengan angka capaian/realisasi kinerja juga berpengaruh.

2. Kelemahan dalam perencanaan dan pengukuran kinerja, dimana basis data PMKS yang tidak akurat dan tidak terintegrasi, masih banyak ditemui data error dan ganda serta tidak valid, sehingga menyebabkan kesulitan dalam pengukuran capaian kinerja karena data PMKS yang tidak mutakhir atau kurang terdokumentasi dengan baik.

Realisasi kinerja di atas didukung oleh penggunaan sumber daya termasuk anggaran. Jumlah alokasi anggaran pada program/kegiatan yang digunakan untuk mewujudkan sasaran Meningkatnya Efisiensi dan Efektivitas serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah adalah sebesar Rp. 5.368.142.655,00 dengan realisasi sebesar Rp. 5.046.629.436,54 Berikut rincian realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Efisiensi dan Efektivitas serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.

Tabel 3.17

Realisasi Anggaran dalam Mendukung Pencapaian Sasaran Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
1	Meningkatnya Efisiensi dan Efektivitas serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	85,93%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 5.368.142.655	Rp. 5.046.629.436,54	94,01%
			<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Rp. 1.550.448	Rp. 1.550.448	100%
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 775.224	Rp. 775.224	100%
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 775.224	Rp. 775.224	100%
			<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Rp. 3.653.345.320	Rp. 3.389.287.973	93,21%
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 3.617.839.801	Rp. 3.353.800.873	93,15%

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp. 35.505.519	Rp. 35.487.100	99,95%
			<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	Rp. 870.788.785	Rp. 827.970.804	95,08%
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 65.021.418	Rp. 59.110.400	90,91%
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 19.303.899	Rp. 15.700.600	81,33%
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 15.738.468	Rp. 14.690.700	93,34%
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp. 12.888.000	Rp. 5.972.000	46,34%
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 717.337.000	Rp. 692.096.604	96,48%
			<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	Rp. 105.373.077	Rp. 104.016.000	98,71%
			Pengadaan Peralatan dan	Rp. 105.373.077	Rp. 104.016.000	98,71%

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
			Mesin Lainnya			
			<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Rp. 464.023.610	Rp. 455.388.173,54	98,14%
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	100%
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 66.989.000	Rp. 65.278.840	97,45%
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 393.034.610	Rp. 386.109.333,54	98,24%
			<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Rp. 273.061.415	Rp. 268.416.038	98,30%
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 178.395.000	Rp. 177.311.038	99,39%
			Pemeliharaan Peralatan dan	Rp. 66.820.000	Rp. 64.150.000	96%

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
			Mesin Lainnya			
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 27.846.415	Rp. 26.955.000	96,80%
			Realisasi Anggaran	Rp. 5.368.142.655	Rp. 5.046.629.436,54	94,31%
			Tingkat efisiensi			5,69%

Berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran program dan kegiatan diatas maka dapat diketahui efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran Meningkatnya Efisiensi dan Efektivitas serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah, capaian realisasi kinerja diperoleh sebesar 85,93% sedangkan realisasi anggaran diperoleh sebesar 94,31%. Oleh karena itu efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran Meningkatnya Efisiensi dan Efektivitas serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dengan nilai efisiensi sebesar 5,69%.

Untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya maka perlu adanya alternatif solusi sebagai rencana tindak lanjut untuk mewujudkan kinerja sasaran Meningkatnya Efisiensi dan Efektivitas serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah, berikut alternatif solusi sebagai rencana tindak lanjut berdasarkan analisis capaian kinerja.

1. Mengesahkan Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait monev Renstra;
2. Menyesuaikan dokumen Perjanjian Kinerja sesuai dengan format yang diatur pada Peraturan Bupati Blitar Nomor 126 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar;
3. Menyusun dokumen cascading kinerja;
4. Menyusun dokumen laporan kinerja sesuai dengan format yang ditentukan dengan menyertakan interpretasi/analisis dengan beberapa tahun sebelumnya serta benchmark nasional;
5. Menyusun dokumen data kinerja sesuai dengan sasaran yang ada pada Dinas Sosial;
6. Melaksanakan dan menyusun dokumen monitoring rencana aksi tiap triwulan pada seluruh program;
7. Melaksanakan dan menyusun pengukuran kinerja per triwulan pada seluruh program sesuai dengan dokumen rencana aksi.

C. Realisasi Anggaran

Laporan pelaksanaan anggaran Dinas Sosial Kabupaten Blitar untuk tahun anggaran 2024 berdasarkan realisasi kinerja dan keuangan yaitu sebagai berikut.

Tabel 3.18
Realisasi Kinerja Dan Keuangan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Kesejahteraan PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	100%	95,39%	95,39	Rp. 11.854.989.245	Rp. 11.116.008.650	93,77
2	Meningkatnya efisiensi dan efektivitas serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai SAKIP	70	60,15	85,93	Rp. 5.368.142.655	Rp. 5.046.629.436,54	94,31

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pencapaian kinerja yang telah dikemukakan pada Bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Blitar untuk tahun 2024 yaitu 95,39% untuk Sasaran Meningkatnya Kesejahteraan PMKS dengan kategori sangat tinggi, 85,93% untuk Sasaran Meningkatnya efisiensi dan efektivitas serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dengan kategori tinggi. Namun begitu masih diperlukan upaya perbaikan/penyempurnaan sehingga pencapaian sasaran pada tahun berikutnya dapat optimal.

Untuk sasaran yang dikategorikan belum berhasil, kendala yang dihadapi antara lain:

1. Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan hanya satu orang selama tahun 2024 karena tidak adanya sinergitas dengan Dinas Tenaga Kerja dan BP2MI;
2. Kurang aktifnya operator SIKS-NG tingkat desa dalam melaksanakan verifikasi dan validasi data karena beban kerja di luar tugas sebagai operator SIKS;
3. Sudah tidak adanya desil/tingkat kesejahteraan sosial sebagai tolak ukur jumlah kemiskinan dan prioritas penerima bantuan sosial, dimana Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial pada aplikasi SIKS-NG yang digunakan sebagai penyanding data penerima bansos APBD, parameternya belum jelas dan kurang terperinci serta banyak data yang kurang tepat, dinamis/berubah-ubah, sehingga menyulitkan proses verifikasi dan validasi data penerima bansos. Selain itu adanya kebijakan Kemensos bahwa database DTKS dalam format excel tidak diperkenankan diberikan kepada Pemerintah Daerah;
4. Masih tercampurnya data penerima bantuan sosial yang bersumber dari APBN (PKH, BPNT) antara yang aktif dan non aktif pada

- Aplikasi SIKS-NG, sehingga tidak diketahui berapa jumlah penerima yang berhasil salur dan gagal salur;
5. Kendala dalam penyaluran bantuan permakanaan bagi korban bencana apabila jumlah korban bencana hanya sedikit sehingga tidak memerlukan Dapur Umum;
 6. Banyaknya usaha dari penerima bantuan sosial kewirausahaan KUBE yang tidak berkembang bahkan kepesertaan dalam usaha kelompok semakin berkurang;
 7. Masalah kesejahteraan sosial seringkali sangat kompleks dan melibatkan berbagai faktor yang saling terkait, seperti kemiskinan, pengangguran, ketidaksetaraan pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Setiap masalah sosial memiliki dinamika yang unik dan dapat dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang berubah-ubah, sehingga sulit memprediksi dengan akurat untuk menentukan target (berapa banyak orang yang akan dijangkau) dan menentukan ketercapaian realisasi kegiatan (manfaat yang bisa diperoleh);
 8. Kesulitan untuk melakukan intervensi monitoring dan evaluasi atas ektivitasnya pelaksanaan program bantuan sosial karena tidak adanya informasi *By Name By Address* (BNBA) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) penerima bansos APBN;
 9. Banyaknya Bayi Baru Lahir (BBL) yang tidak terdeteksi (non aktif) sebagai peserta PBI-JKN meskipun anggota dalam 1 KK terdaftar sebagai kepesertaan PBI-JKN, hal tersebut disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat untuk pelaporan adminduk atas Bayi Baru Lahir (BBL);
 10. Terbatasnya anggaran untuk pendataan PMKS, sehingga pendataan belum dapat dilakukan secara menyeluruh di wilayah, melainkan sementara pendataan masih dilakukan dengan sinergitas bersama instansi/perangkat daerah terkait.

B. Pemecahan Masalah

Untuk mengatasi kendala yang telah diuraikan di atas, Dinas Sosial Kabupaten Blitar telah melakukan beberapa cara pemecahan masalah, antara lain:

1. Melakukan pendataan yang komprehensif mengenai jumlah dan kondisi PPKS. Hal ini untuk memastikan bahwa target sasaran dapat terukur dengan jelas. Pendataan dilakukan dengan sistem informasi berbasis teknologi untuk mempermudah pengumpulan dan analisis data PPKS, pada Dinas Sosial Kab. Blitar saat ini menggunakan aplikasi Pemerintah Daerah yaitu Sistem Informasi Data Kesejahteraan Sosial (SIDAKSOS);
2. Memberikan kesempatan bagi PMKS untuk meningkatkan kemampuan mereka melalui pemberian modal usaha dengan melakukan pengusulan program bantuan sosial baik yang bersumber dari dana APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten;
3. Sinergi dengan instansi lain terkait penanganan PMKS, salah satunya bekerja sama dengan Satpol PP dalam hal penjangkauan dan penanganan gelandangan dan pengemis;
4. Memberikan pelatihan kepada pilar-pilar sosial atau Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) agar mereka memiliki keterampilan dalam melakukan pendampingan, monitoring, dan evaluasi program dengan efektif;
5. Menyediakan fasilitas tempat perlindungan bagi PPKS yang membutuhkan yaitu shelter guna tempat penampungan sementara bagi PPKS dalam kondisi mengalami ketelantaran untuk selanjutnya dilakukan asesmen dan pendampingan oleh tenaga sosial;
6. Meningkatkan akses PMKS pada layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan untuk mendukung kualitas hidup mereka. Dalam hal ini Dinas Sosial Kab. Blitar memiliki peran untuk memberikan layanan rujukan kepada stakeholder terkait;

7. Mendorong pembentukan kelompok pemberdayaan di tingkat masyarakat untuk mendukung PPKS secara berkelanjutan. Salah satunya adalah pembentukan Kampung Siaga Bencana (KSB) dengan tujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan, respons, dan mitigasi bencana di tingkat masyarakat. KSB berfungsi sebagai garda terdepan dalam memberikan pertolongan pertama, mendirikan tempat pengungsian sementara, serta mendistribusikan bantuan logistik kepada masyarakat yang terdampak bencana;
8. Melakukan verifikasi dan validasi atau pemutakhiran data secara berkala pada data PMKS melihat kondisi sosial dan ekonomi masyarakat sering berubah;
9. Melaksanakan pendaftaran Bayi Baru Lahir (BBL) agar terdaftar dalam DTKS dan PBI-JKN maka Dinas Sosial Kabupaten Blitar meluncurkan sebuah inovasi yaitu Sistem Layanan Pendampingan dan Pencatatan Bayi Baru Lahir Kabupaten Blitar (SIAPP-BALITAR) terhadap Penerima Bantuan Iuran-Jaminan Kesehatan (PBI-JK) dengan metode jemput bola/mendatangi langsung warga ke wilayah Desa/Kelurahan;
10. Melakukan sinergi dengan instansi lain dalam hal pemutakhiran data. Dalam proses verifikasi dan pemutakhiran data, Dinas Sosial bisa bekerja sama dengan instansi pemerintah lainnya, seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan BPS untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan data yang dimiliki;

C. Tindak Lanjut

Langkah-langkah sebagai rencana tindak lanjut dalam rangka meningkatkan capaian kinerja pada tahun berikutnya, adalah sebagai berikut:

1. Kerjasama, sinergitas dan optimalisasi antar perangkat daerah dalam penanganan kemiskinan;
2. Kerjasama, sinergitas dan optimalisasi antar perangkat daerah dalam penanganan PMKS;

3. Melaksanakan program inovasi Sistem Layanan Pendampingan dan Pencatatan Bayi Baru Lahir Kabupaten Blitar (SIAPP BALITAR) dengan tujuan pendampingan registrasi NIK Bayi Baru Lahir (BBL) untuk mencegah non aktifnya kepesertaan PBI-JKN;
4. Melaksanakan Integrasi data PMKS yang bersumber dari beberapa instansi/perangkat daerah terkait;
5. Meningkatkan kerjasama dengan OPD dan stakeholder terkait;
6. Melaksanakan pemutakhiran data PMKS;
7. Update data disabilitas dan lansia sebagai data dukung pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
8. Pemulangan warga negara migran sesuai dengan Standar Operasional Prosedur;
9. Berkoordinasi dengan Bappedalitbang dalam penyelenggaraan forum tanggung jawab sosial perusahaan (CSR);
10. Memberikan fasilitas peningkatan kapasitas bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
11. Melakukan penyebarluasan informasi terkait ragam dan prosedur layanan sosial melalui media sosial;
12. Mempersiapkan rencana kerja dan penganggarnya untuk dapat menyediakan bantuan sosial yang bersifat pemberdayaan yaitu bantuan ekonomi produktif bagi masyarakat miskin.

**DOKUMEN
POHON KINERJA
DINAS SOSIAL
KABUPATEN BLITAR
TAHUN 2024**

POHON KINERJA
DINAS SOSIAL KABUPATEN BITAR

Kajian Strategis Daerah	Misi I RPJMD: Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Bitar Berlandaskan Iman dan Takwa dengan Kearifan Lokal Budaya																Misi RPJMD	PK KEPALA DAERAH	
	Tujuan RPJMD : Meningkatkan Taraf Kesejahteraan dan Harmonisasi Sosial Kehidupan Masyarakat																Tujuan RPJMD		
	Indikator Tujuan RPJMD: Persentase Penduduk Miskin																		
	Sasaran RPJMD: Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial																Sasaran RPJMD		
	Indikator Sasaran RPJMD: Persentase PPKS																		
Kajian Strategis Bidang Urusan	Tujuan PD (RENSTRA): Menurunnya Angka PMKS																Tujuan Renstra PD	PK KEPALA OPD	
	Indikator Tujuan PD Renstra: Persentase Angka Penurunan PMKS																		
	Sasaran PD: Meningkatkan Kesejahteraan PMKS																Sasaran PD		
	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah																Indikator Sasaran PD		
	Program PD: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																Program		
Kinerja Manajerial	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah																Indikator Program PD	PK ESELON III	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Administrasi Umum Perangkat Daerah						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Kegiatan PD			
	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun		Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Prangkat Daerah						Jumlah Urut Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dipenuhi			Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dipelihara			Indikator Kegiatan PD
Kinerja Operasional	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Fasilitas Kunjungan Tamu	Pengyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sub Kegiatan	PK I/II ESELON IV
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Urut Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Indikator Sub Kegiatan	
Kinerja Operasional	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan	Tersedianya Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersusunnya Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Tersedianya Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sasaran Staf	PK STAF
	Mengumpulkan, mengidentifikasi dan menganalisis data usulan program/perencanaan	Menyiapkan dan menyusun bahan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Menyiapkan draft laporan penyediaan gaji, tunjangan ASN	1. Menyiapkan bahan pengujian dan pengendalian SPP/SPM sesuai dengan prosedur yang berlaku 2. Melaksanakan pengadministrasian keuangan	1. Membantu menyediakan rencana kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor 2. Membantu menyediakan Laporan atas pelaksanaan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	1. Membantu menyediakan rencana kebutuhan peralatan rumah tangga 2. Membantu menyediakan Laporan atas pelaksanaan pengadaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga	1. Membantu menyediakan rencana kebutuhan barang cetak dan penggandaan 2. Membantu menyediakan Laporan atas pelaksanaan pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan	1. Membantu menyediakan fasilitas kunjungan tamu 2. Membantu menyediakan Laporan atas fasilitas kunjungan tamu	Membantu menghimpun dan mengadministrasi Surat Tugas, SPPD, dan berkas perjalanan dinas Membantu menyusun dokumen-dokumen arsip	Membantu menyusun dokumen-dokumen arsip	1. Membantu menyediakan rencana kebutuhan peralatan dan mesin lainnya 2. Membantu menyediakan Laporan atas pelaksanaan pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Membantu menghimpun dan mengadministrasi kebutuhan benda pos 2. Membantu menyediakan Laporan atas pelaksanaan pengadaan peralatan dan mesin lainnya	1. Membantu menyediakan rencana kebutuhan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2. Membantu menyediakan laporan atas pelaksanaan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1. Membantu menyediakan rencana kebutuhan penyediaan jasa pelayanan umum kantor 2. Membantu menyediakan laporan atas pelaksanaan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	1. Membantu menyediakan rencana kebutuhan kendaraan dinas dan pembayaran pajak atas kendaraan dinas 2. Membantu menyediakan laporan atas pelaksanaan pemeliharaan dan pembayaran pajak atas kendaraan dinas	1. Membantu menyediakan rencana kebutuhan peralatan dan mesin lainnya 2. Membantu menyediakan laporan atas pelaksanaan penyediaan peralatan dan mesin lainnya	1. Membantu menyediakan laporan rencana kebutuhan gedung kantor dan bangunan lainnya 2. Membantu menyediakan laporan pelaksanaan pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya	Indikator Sasaran Staf	



POHON KINERJA
DINAS SOSIAL KABUPATEN BLITAR

Kajian Strategis Daerah	Misi I RPJMD: Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Blitar Berlandaskan Iman dan Takwa dengan Kearifan Lokal Budaya					Misi RPJMD	PK KEPALA DAERAH
	Tujuan RPJMD : Meningkatkan Taraf Kesejahteraan dan Harmonisasi Sosial Kehidupan Masyarakat					Tujuan RPJMD	
	Indikator Tujuan RPJMD: Persentase Penduduk Miskin						
	Sasaran RPJMD: Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial					Sasaran RPJMD	
Kajian Strategis Bidang Urusan	Indikator Sasaran RPJMD: Persentase PPKS						PK KEPALA OPD
	Tujuan PD (RENSTRA): Menurunnya Angka PMKS					Tujuan Renstra PD	
	Indikator Tujuan PD Renstra: Persentase Angka Penurunan PMKS						
	Sasaran PD: Meningkatnya Kesejahteraan PMKS					Sasaran PD	
	Indikator Sasaran PD: Persentase PMKS yang tertangani					Indikator	
	Program PD: Pemberdayaan Sosial					Program	
Kajian Manajerial	Persentase Pemberdayaan Sosial di Masyarakat					Indikator	PK ESELON III
	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota					Kegiatan PD	
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota						
	Persentase Penyelenggara Pengelolaan Sumber Dana Sosial Yang Dibina Dan Dimonitoring Pelaksanaan Kegiatannya					Indikator Kegiatan PD	
Kinerja Operasional	Persentase Jenis Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten Yang Diberdayakan						PK JF / ESELON IV
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Sub Kegiatan	
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Indikator Sub Kegiatan	
	Tersusunnya Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Tercapainya Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Tercapainya Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Tercapainya Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Sasaran Staf	
Kinerja Operasional	1. Menyiapkan draft dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi Penerbitan Izin UGB dan PUB	1. Menyiapkan dokumen peningkatan kapasitas PSM	1. Menyiapkan dokumen peningkatan kapasitas TKSK	1. Menyiapkan dokumen peningkatan kapasitas LKS	1. Menyiapkan dokumen peningkatan kapasitas LK3	Indikator Sasaran Staf	PK STAF
		2. Menyusun kegiatan peningkatan kapasitas PSM	2. Menyusun kegiatan peningkatan kapasitas TKSK	2. Menyusun kegiatan peningkatan kapasitas LKS	2. Menyusun kegiatan peningkatan kapasitas SDM LK3		

PK KEPALA DINAS SOSIAL,
DINAS SOSIAL
TAVIP WIYONO, SE, MM
Pembina Utama Muda

POHON KINERJA
DINAS SOSIAL KABUPATEN BLITAR

Kajian Strategis Daerah	Misi I RPJMD: Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Blitar Berlandaskan Imand an Takwa dengan	Misi RPJMD	PK KEPALA DAERAH
	Tujuan RPJMD : Meningkatkan Taraf Kesejahteraan dan Harmonisasi Sosial Kehidupan Masyarakat	Tujuan RPJMD	
	Indikator Tujuan RPJMD: Persentase Penduduk Miskin		
	Sasaran RPJMD: Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Sasaran RPJMD	
Kajian Strategis Bidang Urusan	Indikator Sasaran RPJMD: Persentase PPKS		PK KEPALA OPD
	Tujuan PD (RENSTRA): Menurunnya Angka PMKS	Tujuan Renstra PD	
	Indikator Tujuan PD Renstra: Persentase Angka Penurunan PMKS		
	Sasaran PD: Meningkatnya Kesejahteraan PMKS	Sasaran PD	
Kajian Manajerial	Indikator Sasaran PD: Persentase PMKS yang tertangani	Indikator Sasaran PD	PK ESELON III
	Program PD: Penanganan Warga Negara Migran Korban Ttindak Kekerasan	Program	
	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang di fasilitasi	Indikator Program PD	
	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten Asal	Kegiatan PD	
Kinerja Operasional	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang di fasilitasi	Indikator Kegiatan PD	PK JF / ESELON IV
	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten Asal	Sub Kegiatan	
	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Indikator Sub Kegiatan	
	Tercapainya Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Sasaran Staf	
Kinerja Operasional	Menyiapkan Data Warga Negara Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Indikator Sasaran Staf	PK STAF

PIL. KEPALA DINAS SOSIAL,
DINAS SOSIAL
TAVIP WIYONO, SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19650311 199703 1 002

POHON KINERJA
DINAS SOSIAL KABUPATEN BITAR

Kajian Strategi Daerah	Misi I RPJMD: Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Bitar Berlandaskan Iman dan Takwa dengan Kearifan Lokal Budaya														Misi RPJMD	PK KEPALA DAERAH
	Tujuan RPJMD: Meningkatkan Taraf Kesejahteraan dan Harmonisasi Sosial Kehidupan Masyarakat														Tujuan RPJMD	
	Indikator Tujuan RPJMD: Persentase Penduduk Miskin															
	Sasaran RPJMD: Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial														Sasaran RPJMD	
	Indikator Sasaran RPJMD: Persentase PMKS															
Kajian Strategi Bidang Urusan	Tujuan PD (RENSTRA): Menurunnya Angka PMKS														Tujuan Renstra PD	PK KEPALA OPD
	Indikator Tujuan PD Renstra: Persentase Angka Penurunan PMKS															
	Sasaran PD: Meningkatkan Kesejahteraan PMKS														Sasaran PD	
	Indikator Sasaran PD: Persentase PMKS yang tertangani														Indikator Sasaran PD	
Kajian Manajerial	Program PD: Rehabilitasi Sosial														Program	PK ESELON III
	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti														Indikator Program PD	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial							Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial							Kegiatan PD	
	1. Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau							Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota							Indikator Kegiatan PD	
	2. Persentase Layanan yang Diberikan Kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial sesuai standar teknis															
Kinerja Operasional	Penyediaan Permakanan	Penyediaan Sandang	Penyediaan Alat Bantu	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu identitas Anak	Pemberian layanan kedaruratan	Pemberian layanan rujukan	Penyediaan Permakanan	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Pemberian Layanan Reunifikasi Keluarga	Pemberian Layanan Rujukan	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan	PK JF / ESELON IV	
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Indikator Sub Kegiatan		
Kinerja Operasional	Tersedianya Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Sasaran Staf	PK STAF	
	1. Menyiapkan kebutuhan permakanan sembako	1. Menyiediakan data penerima sandang	1. Menyiediakan data penerima alat bantu	1. Menyiediakan data kebutuhan pelaksanaan bimbingan	1. Melakukan koordinasi dengan panti dan fasilitas pendidikan dan kesehatan	1. Melakukan koordinasi dengan Dispendukcapil	1. Melaksanakan layanan kedaruratan tanggap darurat	1. Melakukan koordinasi dengan instansi lain	1. Menyiediakan data penerima bantuan permakanan di shelter	1. Menyiediakan data keluarga PMKS	1. Melakukan penelusuran keluarga PMKS	1. Melakukan koordinasi dengan instansi lain	1. Melakukan koordinasi dengan instansi lain / mitra	Indikator Sasaran Staf		
	2. Menyiediakan data penerima permakanan	2. Mendistribusikan sandang kepada klien	2. Mendistribusikan alat bantu kepada penerima	2. Melaksanakan kegiatan bimbingan	2. Merujuk orang terlantar ke fasilitas pendidikan dan kesehatan	2. Memfasilitasi klien dalam perekaman biometrik		2. Melakukan rujukan klien ke instansi lain	2. Melakukan koordinasi dengan catering/pengadaan makanan untuk klien	2. Menyelenggarakan bimbingan sosial kepada keluarga PMKS	2. Melakukan pemulangan klien terlantar ke wilayah asal	2. Merujuk PMKS ke instansi terkait	2. Menyiapkan nota kesepahaman (MoU) dengan instansi lain			
	3. Pembelian paket sembako dan pendistribusian kepada klien								3. Melakukan distribusi makanan							



POHON KINERJA
DINAS SOSIAL KABUPATEN BLITAR

Kajian Strategis Daerah	Misi I RPJMD: Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Blitar Berlandaskan Iman dan Takwa dengan Kearifan Lokal Budaya				Misi RPJMD	PK KEPALA DAERAH
	Tujuan RPJMD : Meningkatkan Taraf Kesejahteraan dan Harmonisasi Sosial Kehidupan Masyarakat				Tujuan RPJMD	
	Indikator Tujuan RPJMD: Persentase Penduduk Miskin					
	Sasaran RPJMD: Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial				Sasaran RPJMD	
Kajian Strategis Bidang Urusan	Indikator Sasaran RPJMD: Persentase PPKS					PK KEPALA OPD
	Tujuan PD (RENSTRA): Menurunnya Angka PMKS				Tujuan Renstra PD	
	Indikator Tujuan PD Renstra: Persentase Angka Penurunan PMKS					
	Sasaran PD: Meningkatnya Kesejahteraan PMKS				Sasaran PD	
	Indikator Sasaran PD: Persentase PMKS yang tertangani				Indikator	
	Program PD: Perlindungan dan Jaminan Sosial				Program	
Kajian Manajerial	Persentase penerima PKH (Program Keluarga Harapan), PBI-JK (Penerima Bantuan Iuran - Jaminan Kesehatan), dan BSP (Bantuan Sosial Pangan) yang difasilitasi				Indikator Program PD	PK ESELON III
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				Kegiatan PD	
	Persentase DTKS, PBI-JK dan PMKS yang divalidasi Dan diverifikasi				Indikator Kegiatan PD	
Kinerja Operasional	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/kota	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Sub Kegiatan	PK JF / ESELON IV
	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Indikator Sub Kegiatan	
Kinerja Operasional	Tercapainya Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Tercapainya Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Tercapainya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Tercapainya Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Sasaran Staf	PK STAF
	1. Menyiapkan dan menghimpun BNBA (By Name By Address) fakir miskin cakupan daerah kab/kota 2. Menyusun kegiatan pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota	1. Menyiapkan dan menghimpun BNBA (By Name By Address) keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin Kabupaten/Kota 2. Menyusun kegiatan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kab/kota	1. Menyiapkan dan menghimpun BNBA (By Name By Address) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten/kota 2. Menyusun kegiatan fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga	1. Menghimpun, mengidentifikasi dan mengadministrasi dokumen orang yang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat kewenangan kabupaten/kota 2. Menyusun kegiatan fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat	Indikator Sasaran Staf	

DIL. KEPALA DINAS SOSIAL,
DINAS SOSIAL
TAVIP WYONO, SE. MM
Pembina Utama Muda

POHON KINERJA
DINAS SOSIAL KABUPATEN BLITAR

Kajian Strategis Daerah	Misi I RPJMD: Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Blitar Berlandaskan Imand an Takwa dengan Kearifan Lokal Budaya						Misi RPJMD	PK KEPALA DAERAH
	Tujuan RPJMD : Meningkatkan Taraf Kesejahteraan dan Harmonisasi Sosial Kehidupan Masyarakat						Tujuan RPJMD	
	Indikator Tujuan RPJMD: Persentase Penduduk Miskin							
	Sasaran RPJMD: Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial						Sasaran RPJMD	
Kajian Strategis Bidang Urusan								PK KEPALA OPD
	Tujuan PD (BENSTRA): Menurunnya Angka PMKS						Tujuan Renstra PD	
	Indikator Tujuan PD Renstra: Persentase Angka Penurunan PMKS							
	Sasaran PD: Meningkatnya Kesejahteraan PMKS						Sasaran PD	
Kajian Manajerial								PK ESELON III
	Indikator Tujuan PD Renstra: Persentase Angka Penurunan PMKS							
	Sasaran PD: Meningkatnya Kesejahteraan PMKS							
	Indikator Sasaran PD: Persentase PMKS yang tertangani						Indikator	
	Program PD: Penanganan Bencana						Program	
Kinerja Operasional	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten						Indikator Program PD	PK JF / ESELON IV
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota			Kegiatan PD	
	Persentase Korban Bencana Yang Mendapat Perlindungan Dan Pemulihan Pasca Bencana			Persentase Masyarakat yang terlibat aktif dalam Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten			Indikator Kegiatan PD	
	Penyediaan Makanan	Penyediaan Sandang	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Pelayanan Dukungan Psikososial	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Sub Kegiatan	
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Indikator Sub Kegiatan	
Kinerja Operasional	Tersedianya Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Sasaran Staf	PK STAF
	1. Menyiapkan daftar penerima bantuan permakanan	1. Menyiapkan daftar penerima bantuan sandang	1. Menyiapkan daftar penerima penanganan bagi kelompok rentan	1. Melaksanakan LDP bersama Tagana dan relawan	1. Menyiapkan pelaksanaan koordinasi dan sosialisasi KSB	1. Menyiapkan dokumen koordinasi dan sosialisasi TAGANA	Indikator Sasaran Staf	
	2. Mengkoordinasikan pemenuhan kebutuhan permakanan	2. Mengkoordinasikan pemenuhan kebutuhan sandang	2. Mengkoordinasikan layanan yang akan diberikan kepada kelompok rentan	2. Mengkoordinasikan kebutuhan untuk LDP	2. Mengkoordinasikan dengan instansi terkait koordinasi dan sosialisasi KSB	2. Mengkoordinasikan pelaksanaan koordinasi dan sosialisasi TAGANA		
	3. Menyusun laporan pertanggungjawaban	3. Menyusun laporan pertanggungjawaban						

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS SOSIAL
TAVIP WIYONO, SE. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19650311 199703 1 002

**DOKUMEN
PERJANJIAN KINERJA
DINAS SOSIAL
KABUPATEN BLITAR
TAHUN 2024**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BAMBANG DWI PURWANTO, S.STP, M.Si

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Blitar

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hj. Rini Syarifah

Jabatan : Bupati Blitar

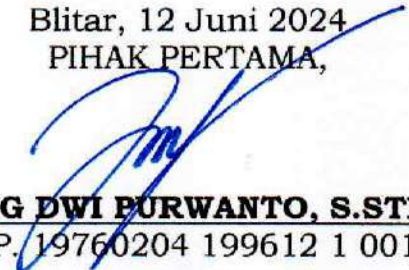
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.



Blitar, 12 Juni 2024

PIHAK PERTAMA,


BAMBANG DWI PURWANTO, S.STP, M.Si
NIP. 19760204 199612 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL KABUPATEN BLITAR

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kesejahteraan PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	100%
2	Meningkatnya efisiensi dan efektivitas serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai SAKIP	80

	Program	Anggaran (Rp.)
	Program Utama	
1	Program Pemberdayaan Sosial	1.338.859.384
2	Program Rehabilitasi Sosial	839.452.072
3	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	5.693.790.262
4	Program Penanganan Bencana	234.304.125
5	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kererasan	4.948.870
	Program penunjang	
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.779.630.969
	Jumlah	13.890.985.682



Bupati Blitar

Hj. RINI SYARIFAH

Blitar, 12 Juni 2024
Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Blitar

BAMBANG DWI PURWANTO, S.STP, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19760204 199612 1 001



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BAMBANG DWI PURWANTO, S.STP, M.Si
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Blitar

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Ir. JUMADI, M.MT.
Jabatan : Pjs. Bupati Blitar

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.



PIHAK KEDUA,

Dr. Ir. JUMADI, M.MT.

Blitar, 31 Oktober 2024

PIHAK PERTAMA



BAMBANG DWI PURWANTO, S.STP, M.Si

NIP. 19760204 199612 1 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS SOSIAL KABUPATEN BLITAR

No. (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Sasaran (3)	Target (4)
1	Meningkatnya kesejahteraan PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	100%
2	Meningkatnya efisiensi dan efektivitas serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai SAKIP	70

Program	Anggaran	Keterangan
1 Program Pemberdayaan Sosial	Rp 1.338.858.935	
2 Program Rehabilitasi Sosial	Rp 1.114.397.175	
3 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp 9.168.790.230	
4 Program Penanganan Bencana	Rp 231.342.905	
5 Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kererasan	Rp 1.600.000	
6 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 5.368.142.655	
Jumlah	Rp 17.223.131.900	


 Pjs. Bupati Blitar
Dr. Ir. JUMADI, M.MT.

Blitar, 31 Oktober 2024
 Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Blitar

BAMBANG DWI PURWANTO, S.STP, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19760204 199612 1 001

**DOKUMEN
INDIKATOR KINERJA
UTAMA (IKU)
DINAS SOSIAL
KABUPATEN BLITAR
TAHUN 2024**



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

DINAS SOSIAL

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 38 Telp. 801357

Website: www.dinsos.blitarkab.go.id, Email: dinsos@blitarkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL

NOMOR : 37 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN BLITAR

KEPALA DINAS SOSIAL,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bupati Blitar Nomor 30 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Blitar ;
- b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Blitar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 ;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;

8. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blitar (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2008 Nomor 9/E) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pembentukann dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Blitar Nomor 30 Tahun 2014 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Blitar ;
13. Peraturan Bupati Blitar Nomor 101 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Blitar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN BLITAR
- KESATU : Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Blitar, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Blitar dalam menetapkan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Blitar dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Blitar.

- KEEMPAT : Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 27 September 2024



BAMBANG DWI PURWANTO, S.STP, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19760204 199612 1 001

**MATRIK INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS SOSIAL KABUPATEN BLITAR**

Sasaran RPJMD : Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Blitar berdasarkan iman dan takwa dengan kearifan lokal budaya

NO.	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (FORMULASI PERHITUNGAN)	PROGRAM	SUMBER DATA
1	Menurunnya angka PMKS	Meningkatnya kesejahteraan PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	Jumlah PMKS yang tertangani pada tahun (n) ----- x 100% Jumlah PMKS yang seharusnya tertangani pada tahun (n) Penjelasan: -PMKS merupakan 26 golongan masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial - PMKS yang tertangani adalah PMKS yang diberi sesuatu berupa uang dan/atau barang, misalnya bantuan permakanan, alat modal usaha, bantuan sosial, serta diberikan pelatihan, pendampingan, rekomendasi dan pelayanan jenis apapun oleh Dinas Sosial - PMKS sasaran adalah masyarakat PMKS yang menjadi target sasaran pemberian bantuan dan terdata pada DTKS	Program Rehabilitasi Sosial Program Pemberdayaan Sosial Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Program Penanganan Bencana	Laporan Tribulan PPTK (Laporan bantuan sosial yang tersalurkan, laporan penanganan klien rehabilitasi sosial, laporan pemberdayaan sosial, dan laporan korban bencana alam dan sosial yang ditangani)

**DOKUMEN
RENCANA AKSI
DINAS SOSIAL
KABUPATEN BLITAR
TAHUN 2024**

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL KABUPATEN BLITAR

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET PELAKSANAAN PER TRIWULAN				KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN	PENANGGUNG JAWAB
					I	II	III	IV		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	5.779.630.969						Sekretaris Dinas
<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun</i>	<i>dokumen</i>	<i>9</i>	<i>1.550.448</i>						
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	3	775.224	v	v			Penggandaan RKA, penyusunan Renja	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	6	775.224	v	v	v	v	Penyusunan LPPD, LKPJ, LKJIP, SAKIP, laporan tribulan	
<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>%</i>	<i>100</i>	<i>4.072.219.102</i>						
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	38	4.035.693.583	v		v		Penyediaan gaji dan tunjangan ASN Dinsos	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	6	36.525.519	v	v	v	v	Penggandaan Laporan Keuangan, Semester, laporan penatausahaan, Laporan DPA, DPPA, RKA dan RKA-P	
<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>%</i>	<i>100</i>	<i>846.059.203</i>						
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	12	65.021.169	v	v	v	v	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor : kertas dan cover, alat tulis kantor dan bahan komputer	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	12	19.303.899		v	v	v	Pengadaan Perabot Kantor, Alat Listrik dan Bahan untuk Kegiatan kantor lainnya	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	2	14.739.135	v	v	v	v	Mencetak banner, blangko SPM, amplop dinas, map dinas, fotokopi	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	12	7.288.000	v	v	v	v	Penyediaan makan minum tamu	

[illegible]

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET PELAKSANAAN PER TRIWULAN				KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN	PENANGGUNG JAWAB
					I	II	III	IV		
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Pemberdayaan Sosial di Masyarakat	%	100	1.338.859.384						Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial
<i>Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase Penyelenggara Pengelolaan Sumber Dana Sosial Yang Dibina Dan Dimonitoring Pelaksanaan Kegiatannya</i>	%	100	2.400.000						
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	dokumen	75	2.400.000	v	v	v		Penjangkauan	
<i>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase Jenis Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten Yang Diberdayakan</i>	%	100	1.336.459.384						
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	22	7.598.600		v			Bimtek Dasar PSM	
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	22	248.594.250	v	v	v	v	Honor Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	lembaga	27	1.072.133.334	v	v	v	v	Rapat, Bimtek, Pelatihan, Hibah, Peringatan Hari Pahlawan, Belanja Sembako	
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	sertifikat	17	8.133.200	v	v	v	v	Penjangkauan Klien	
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang di fasilitasi	%	100	4.948.870						Kepala Bidang Penanganan Bencana
<i>Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten Asal</i>	<i>Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang di fasilitasi</i>	%	100	4.948.870						

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET PELAKSANAAN PER TRIWULAN				KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN	PENANGGUNG JAWAB
					I	II	II	IV		
Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	100	4.948.870		v	v	v	Pemberian bantuan sembako bagi warga negara migran korban tindak kekerasan yang dipulangkan dari titik debarkasi di daerah Kabupaten Blitar untuk dipulangkan ke Desa/kelurahan asal.	
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	839.452.072						Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1. Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	%	100	744.198.777						
	2. Persentase Layanan yang Diberikan Kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial sesuai standar teknis	%	100							
Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	200	29.767.800	v	v	v	v	Pemberian paket sembako kepada PPKS terlantar yang ditangani oleh bidang rehabilitasi sosial	
Penyediaan sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	30	5.880.225	v	v	v	v	Pemberian sandang kepada PPKS terlantar yang ada di luar panti sosial	
Penyediaan alat bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	177	651.187.827			v	v	Pemberian alat bantu kepada penyandang disabilitas hasil MUSRENBANG 2024	

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET PELAKSANAAN PER TRIWULAN				KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN	PENANGGUNG JAWAB
					I	II	III	IV		
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	40	34.887.925	v	v	v	v	Penjangkauan klien dan pemberian pelatihan kepada klien penyandang disabilitas	
Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	10	5.075.000	v	v	v	v	Penjangkauan klien penyandang disabilitas, anak terlantar, dan gelandangan pengemis yang membutuhkan layanan pendidikan dan kesehatan dasar	
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	5	3.555.000	v	v	v	v	Penjangkauan klien penyandang disabilitas, anak terlantar, dan gelandangan pengemis yang membutuhkan layanan adminitrasi kependudukan	
Pemberian layanan kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	20	7.300.000	v	v	v	v	Penjangkauan klien penyandang disabilitas, anak terlantar, dan gelandangan pengemis yang dilaporkan dan membutuhkan penanganan segera	
Pemberian layanan rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	20	6.545.000	v	v	v	v	Pemberian layanan rujukan kepada klien PPKS ke UPT Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur	
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Jenis Layanan Rehabilitasi Yang Diberikan Kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	layanan	4	95.253.295						
Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	100	57.000.000	v	v	v	v	Fasilitasi pemberian makanan dan minuman klien PPKS terlantar yang ada di Shelter PPKS Dinas Sosial Kabupaten Blitar	
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	100	17.778.295	v	v	v	v	Penjangkauan klien dan pemberian bimbingan kepada keluarga klien PPKS yang membutuhkan penanganan rehabilitasi sosial	

[illegible]

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET PELAKSANAAN PER TRIWULAN				KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN	PENANGGUNG JAWAB
					I	II	II	IV		
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	%	100	234.304.125						Kepala Bidang Penanganan Bencana
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana Yang Mendapat Perlindungan Dan Pemulihan Pasca Bencana	%	100	105.782.125						
Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	1000	84.826.565	v	v	v	v	Pemberian layanan dapur umum dan pemberian paket sembako bagi korban bencana alam dan sosial di wilayah Kabupaten Blitar	
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	100	8.136.300	v	v	v	v	Pemberian bantuan sandang bagi korban bencana alam dan sosial di Wilayah Kabupaten Blitar	
Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	100	8.902.200	v	v	v	v	Pemberian bantuan sembako bagi kelompok rentan baik korban bencana maupun kelompok rentan yg beresiko menjadi korban bencana alam dan sosial di wilayah Kabupaten Blitar	
Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	100	3.917.060	v	v	v	v	Pemberian pelayanan dukungan psikososial bagi korban bencana alam dan sosial di wilayah Kabupaten Blitar	
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Masyarakat yang terlibat aktif dalam Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten	%	40	128.522.000						
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	kampung	4	14.972.000			v	v	Melaksanakan rapat koordinasi anggota KSB dan monitoring KSB di Wilayah Kab Blitar	

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET PELAKSANAAN PER TRIWULAN				KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN	PENANGGUNG JAWAB
					I	II	III	IV		
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	40	113.550.000	v	v	v	v	Pemberian honor jasa tenaga penanganan bencana (anggota tagana) dan bantuan transport bagi anggota tagana saat melakukan penanganan bencana maupun kegiatan lain seperti menghadiri undangan apel dll.	
TOTAL				13.890.985.682						

Blitar, 26 Februari 2024

Menghormati,
Plt. Kepala Dinas Sosial


TAVIP WIYONO, SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19650311 199703 1 002